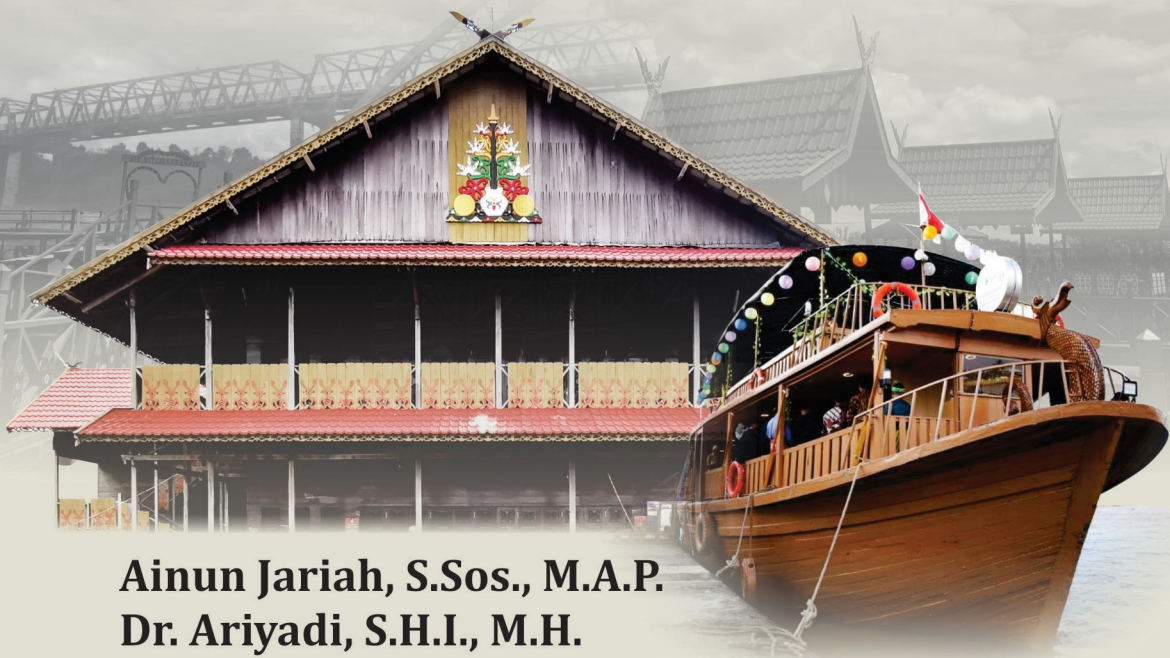




# DINAMIKA PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan Pariwisata  
Kalimantan Tengah Berbasis  
*Local Wisdom*



**Ainun Jariah, S.Sos., M.A.P.**  
**Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H.**  
**Nurbaiti Dailayanti**  
**Imanda Salsabila**

Pengantar oleh:

**Dr. H. M. Riban Satia, S.Sos., M.Si.**

**(Pengamat dan praktisi pembangunan Kalimantan Tengah)**

# **DINAMIKA**

# **PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pengembangan Pariwisata Kalimantan**  
**Tengah Berbasis *Local Wisdom***

**Ainun Jariah, S.Sos., M.A.P.**  
**Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H.**  
**Nurbaiti Dailayanti**  
**Imanda Salsabila**

**Editor**

**Dr. Norcahyono, S.Pd.I., M.H.**  
**Maria Ulfah, S.E.I., M.E.**



**Penerbit K-Media**  
**Yogyakarta, 2024**

# **Dinamika Pembangunan Daerah : pengembangan pariwisata kalimantan tengah berbasis *local wisdom***

Penulis:

Ainun Jariah, S.Sos., M.A.P.

Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H.

Nurbaiti Dailayanti

Imanda Salsabila

ISBN: 978-623-174-457-9

Editor

Dr. Norcahyono, S.Pd.I., M.H.

Maria Ulfah, S.E.I., M.E.

Tata Letak: Setia S Putra

Desain Sampul: Setia S Putra

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

WA +6281-802-556-554, Email: [kmedia.cv@gmail.com](mailto:kmedia.cv@gmail.com)

Cetakan pertama, Juni 2024

Yogyakarta, Penerbit K-Media 2024

15,5 x 23 cm, vi, 157 hlm.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*All rights reserved*

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku berjudul "Dinamika Pembangunan Daerah: Pengembangan Pariwisata Kalimantan Tengah Berbasis Local Wisdom" ini hadir sebagai kontribusi kami dalam menyajikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama yang memiliki minat terhadap pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pembangunan daerah di Kalimantan Tengah melalui pendekatan pariwisata yang mengedepankan local wisdom. Kami berharap, dengan hadirnya buku ini, pembaca dapat memperoleh wawasan baru dan mendalam mengenai potensi, tantangan, dan strategi pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah.

Proses penyusunan buku ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada para penulis, peneliti, editor, dan penerbit yang telah bekerja keras untuk mewujudkan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku

ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi sumber inspirasi bagi semua yang membacanya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang berguna dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pariwisata berbasis local wisdom di Kalimantan Tengah.

Selamat membaca!  
Palangka Raya, Juni 2024

Dr. H. M. Riban Satia, S.Sos., M.Si.  
(Pengamat dan praktisi pembangunan  
Kalimantan Tengah)

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>

## **BAB**

<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Ruang Lingkup Pembangunan Daerah .....	1
<b>II KONSEP PEMBANGUNAN SEKTOR</b>	
<b>PUBLIK .....</b>	<b>23</b>
A. Definisi Teori Pembangunan Sektor Publik .....	23
B. Organisasi Sektor Publik .....	27
C. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik .....	31
D. Komponen Lingkungan Yang Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik .....	31
E. Public Goods (Barang Publik) .....	32
F. Layanan dan Kebutuhan Pengukuran Sektor Publik .....	36
G. Hambatan-hambatan Pada Pembangunan Sektor Publik .....	40
H. Pembangunan Lingkungan .....	45
<b>III KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN</b>	
<b>PARIWISATA .....</b>	<b>47</b>
A. Pengembangan Destinasi Wisata .....	47
<b>IV PERAN AKTOR DALAM PEMBANGUNAN</b>	
<b>PARIWISATA .....</b>	<b>69</b>
A. Identifikasi Aktor .....	69
B. Teori Peran .....	70
C. Peran Aktor dalam Pariwisata .....	73
D. Peran Pemerintah dalam Pariwisata .....	75
E. Peran Masyarakat dalam Pariwisata .....	83
F. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Aktor dalam Pariwisata .....	86

<b>V</b>	<b>PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH BERBASIS LOCAL WISDOM.....</b>	<b>88</b>
A.	Pengembangan Desa Wisata di Kalimantan Tengah .....	88
B.	Integrasi Wisata di Kalimantan Tengah .....	102
<b>VI</b>	<b>KENDALA ATAU PERMASALAHAN PARIWISATA .....</b>	<b>117</b>
A.	Teori Kendala .....	117
B.	Kendala .....	118
C.	Pengembangan.....	119
D.	Pariwisata .....	121
E.	Kendala Pengembangan Pariwisata.....	123
F.	Kendala Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Tengah.....	126
G.	Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kendala Pengembangan Pariwisata.....	140
	<b>SENARAI PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
	<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>151</b>

# **BAB**

## **I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **A. Ruang Lingkup Pembangunan Daerah**

Pembangunan adalah upaya terus menerus untuk menciptakan keadaan yang dapat memberikan lebih banyak pilihan yang sah atau sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi humanistiknya. Pada dasarnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah aspirasi paling manusiawi. Para ahli pengembangan wilayah biasanya mencari tolok ukur kapan pembangunan terjadi, tetapi definisi ini, secara filosofis, dapat diterima. Oleh karena itu, secara filosofis diakui bahwa setiap orang memiliki aspirasi yang dinamis. Setelah satu tujuan tercapai, tujuan lain muncul. Pembangunan terdiri dari peningkatan pendidikan dan pendapatan.

Secara umum, tujuan pembangunan adalah untuk menghasilkan negara yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Ini akan berfungsi sebagai landasan untuk tahap berikutnya dari kemajuan menuju masyarakat yang adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan difokuskan pada sektor ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai penggerak utama untuk pembangunan yang sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bidang ini didorong untuk saling memperkuat, saling terkait, dan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain. Kegiatan ekonomi harus berkembang dengan cepat untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang diinginkan. Dengan

demikian, pertumbuhan ekonomi harus diproyeksikan cukup tinggi, rata-rata 7% per tahun. Sektor industri harus berperan sebagai penggerak ekonomi untuk mencapai berbagai sasaran tersebut. Selain itu, industri diharapkan sebagai penyerap utama tenaga kerja produktif, dan secara bertahap akan menggantikan pertanian. Diproyeksikan pertumbuhan industri di atas 9% per tahun. Mengembangkan agroindustri dan agrobisnis meningkatkan hubungan antara sektor industri dan pertanian. Dengan cara yang sama, hubungan antara industri dan bidang lain yang mengelola sumber daya alam, seperti pertambangan, harus diperhatikan agar struktur industri menjadi lebih kuat.

Meningkatnya aktivitas pembangunan menyebabkan pengelompokan penduduk dan kegiatan ekonomi, yang menyebabkan ketimpangan antarwilayah dan golongan penduduk. Jika tidak ditangani secara mendasar, ketidakmerataan ini akan menjadi semakin besar. Pergeseran pemanfaatan ruang diperkirakan akan terjadi karena peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam dan pemisahan penduduk dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi sangat penting untuk proyek yang akan datang. Penataan ruang harus dikombinasikan dengan penataan penggunaan lahan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Rencana penggunaan lahan merupakan komponen penting dari penataan ruang daratan dan merupakan bagian integral dari rencana tata ruang. Penataan ruang dimaksudkan untuk menciptakan pola ruang yang memungkinkan pembangunan yang adil, serasi, merata, dan berkesinambungan.

## 1. Tolok Ukur Pembangunan

Sebelum tahun 1940-an, para pakar ekonomi, terutama yang berasal dari aliran neoklasik, sangat percaya pada mekanisme pasar karena mereka percaya bahwa mereka dapat mengoptimalkan sumber daya dan mengaturnya dengan baik. Pandangan ini sekarang kita ketahui sangat kapitalis. Setelah tahun 1940-an, baru dirasakan bahwa perencanaan pembangunan diperlukan, dan mereka sudah mulai meninggalkan keyakinan bahwa ekonomi pasar adalah satu-satunya dasar pegangan. Fakta bahwa teori pembangunan tidak ada pada waktu itu; satu-satunya yang ada adalah buku teori klasik, dan mereka hanya berbicara tentang hal-hal di dunia nyata. Jadi, ketika Jerman kalah dalam perang dan perlu meremajakan ekonominya, diciptakan gagasan yang dikenal sebagai Marshal Plan. Gagasan ini berasal dari Alfred Marshall, pencetusnya. Ada bukti dari program Marshall bahwa jika dana diberikan sehingga dapat mencapai tingkat Gross National Product (GNP) yang melebihi 5%, negara tersebut memiliki kemampuan untuk tumbuh sendiri. Dengan demikian, paradigma bahwa investasi adalah yang paling penting muncul. Inilah yang membentuk pertumbuhan negara-negara baru, seperti Indonesia, Israel, India, Filipina, dan Pakistan adalah negara pertama yang menerima dana tersebut.

Pada tahun 60-an, beberapa negara tumbuh dengan cepat, terutama Israel (11 persen), India (6-8 persen), dan Indonesia (6-7 persen). Namun, masalah baru muncul: pertumbuhan yang cepat tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata, terutama di negara-negara sedang berkembang, yang memiliki konsekuensi yang merugikan seperti India. Oleh karena itu, pada tahun 1970-an, para pakar ekonomi pembangunan meninjau kembali kriteria

pertumbuhan, yang pada awalnya hanya mencakup gross national product. Namun, pada akhirnya, kriteria Bartl tetap memiliki kelemahan dan kekurangan. Hasil penelitian ini menghasilkan standar umum berikut:

**a. Pertumbuhan GNP**

Gross National Product adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari kerja produktif tahunan suatu negara atau yang dikenal sebagai produk nasional bruto. Karena aspirasi selalu meningkat sebagai hasil dari pembangunan, GNP tetap menjadi salah satu kriteria.

Pencapaian aspirasi yang meningkat memerlukan akumulasi modal. GNP dapat dijadikan tolak ukur karena:

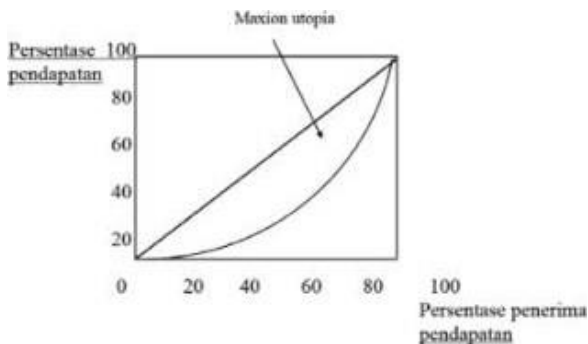
- 1) GNP dapat ditetapkan dengan cepat, seperti halnya GRP (Gross Regional Product), di mana pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan fakta bahwa jika pertumbuhan pertumbuhan lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan berkurang. Perlu diingat bahwa ekspor, depresiasi, dan faktor lain tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan perkapita. Akibatnya, hanya GNP bersih yang dapat dihitung dalam pendapatan perkapita.
- 2) GRP akan meningkatkan aspirasi, jadi setiap wilayah harus mengakumulasikan lebih banyak modal untuk meningkatkan peluang untuk mencapai lebih banyak.

Dari teori keputusan individu, sangat sulit untuk turun dari standar hidup tertentu. Dalam kebanyakan kasus, ketika kesejahteraan meningkat, permintaan dan keinginan akan meningkat, yang berarti ada kebutuhan untuk akumulasi modal. Pajak dapat meningkatkan produksi jika penduduk rasional.

## b. Pendapatan Perkapita

Wajarnya pertumbuhan ekonomi harus selalu melebihi pertumbuhan penduduk, karena bila pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari pertumbuhan penduduk maka rataan pendapatan (kesejahteraan masyarakat) akan menurun. Karena pendapatan perkapita merupakan suatu pendapatan agregat yang menyembunyikan ketimpangan, maka kita juga harus mengukur distribusi pendapatan dengan menggunakan standar Gini Ratio Lorenz (Gambar 1.1)

Dalam rasio Gini, terdapat garis diagonal yang menunjukkan distribusi pendapatan yang paling ideal. Dalam teori Maxion Utopia, pemerataan absolut dicapai, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan setiap orang adalah sama. Sebenarnya, setiap negara tidak pernah mencapai utopia maksimal. Ukuran relatif distribusi pendapatan adalah luas antara maxion utopia dan kurva Lorenz, yang dibagi setengah bujur sangkar, dan semakin keluar, semakin buruk distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan lebih buruk jika rasio gini mendekati satu, dan distribusi pendapatan lebih baik jika rasio gini lebih rendah.



Gambar 1.1 Kurva Lorenz

### **c. Kesempatan Kerja**

Kegiatan yang menghasilkan nilai tambahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut kerja. Namun, tidak semua nilai meningkatkan tenaga kerja. Wilayah atau negara akan lebih berkembang jika tingkat penganggurannya rendah. Seseorang yang berada dalam kategori angkatan kerja (umur 10 hingga 55 tahun), bekerja kurang dari 36 jam seminggu, dan masih mencari pekerjaan dianggap menganggur. Karena anak sekolah tidak mencari pekerjaan, mereka tidak dianggap menganggur. Teori konvensional masih mengizinkan tingkat pengangguran sampai 4%. (full employment). Hal ini berkaitan dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi tentang ketersediaan pekerjaan. Itu hanya masalah waktu dalam hal ini. Karena pengangguran dihitung secara formal, angka pengangguran di Indonesia sangat kecil (kurang dari 1%). Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati karena pengangguran di Indonesia adalah pengangguran yang tidak terbuka. Ini berkaitan dengan fakta bahwa mendaftar sebagai penganggur atau menyatakan diri sebagai penganggur sama sekali tidak berguna.

Di Indonesia pengangguran ada dua macam, yaitu yang bersifat fungsional dan yang bersifat struktural, seperti dikemukakan berikut ini.

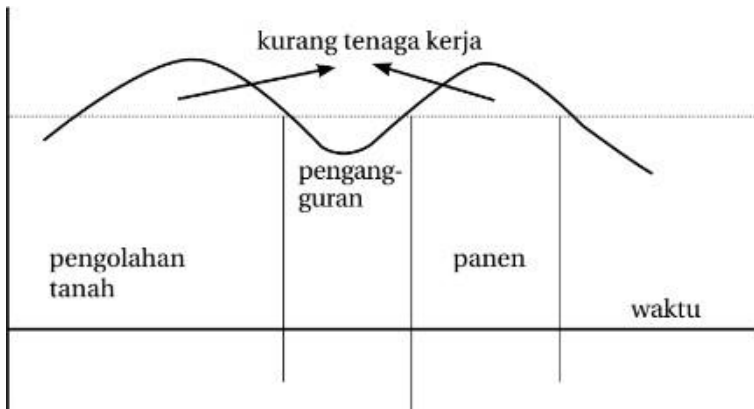
#### **1.) Pengangguran Fungsional**

Pengangguran fungsional dapat dibedakan menjadi pengangguran tidak kentara (disguished unemployment) dan pengangguran musiman. Pengangguran tidak kentara dapat diketahui dengan pendekatan fungsi produksi seperti dikemukakan pada Gambar 1.3. Pada Gambar I .3 tampak bahwa

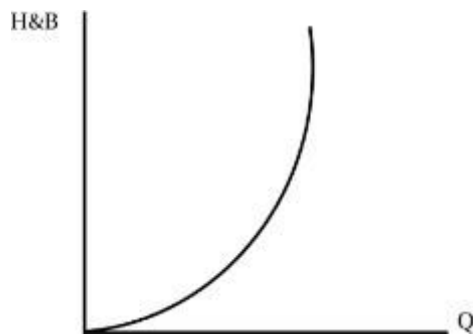
pengangguran tenaga kerja maksimum sebesar  $x_1$ , artinya bila jumlah tenaga kerja ditambah tidak akan meningkatkan produksi bahkan produksi menurun ( $MP = -1$ ), sehingga  $x_1, x_2$  adalah termasuk dalam kategori pengangguran tidak kentara. Pengangguran musiman banyak terjadi di sektor pertanian, karena pada sektor ini banyak tergantung pada musim/ iklim yang menyebabkan petani mempunyai waktu sibuk dan membutuhkan tenaga kerja banyak. Setelah itu kegiatan berkurang bahkan tidak ada, sehingga petani tinggal menganggur (tidak produktif), seperti tertera pada Gambar 1.2.

## 2.) **Pengangguran Struktural**

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4, istilah *Kinked Supply Labor* merujuk pada salah satu bentuk pengangguran yang bersifat struktural. Kurva ini mengatakan bahwa tenaga kerja akan menjadi kurang produktif pada tingkat produksi tertentu, sehingga dianggap tidak penting. pada Saat upah tinggi tidak mau kerja, ini gejala yang tidak rasional. Jadi seolah-olah ada target output dan setelah target itu tercapai tenaga kerja berhenti bekerja walaupun peluang untuk bekerja masih ada. Sektor informal juga merupakan bentuk pengangguran struktural.



**Gambar 1.2 Kondisi Pengangguran Musiman**



**Gambar 1.3 Suplai Tenaga Kerja yang Kinked**

Sifat-sifat sektor informal ini adalah: (a) untuk memasuki sektor informal tidak memerlukan modal yang besar, (b) tidak dibutuhkan keterampilan yang spesifik, (c) perputaran uang cepat, (d) insentif tenaga kerja, (e) elastisitas permintaan tenaga kerja sangat elastis, kapan saja bisa masuk dan bisa keluar, dan (f) pada umumnya produktivitasnya rendah. Dengan demikian, di sektor informal ini diduga banyak terjadi pengangguran tidak kentara.

Apa kaitan distribusi pendapatan dengan kesempatan kerja?, pemerataan cenderung mengurangi investasi, dan akumulasi modal cenderung mengurangi kesempatan kerja.

Semakin kecil tingkat pendapatan seseorang, pada umumnya akan semakin kecil pula tingkat marginal property for save. Semakin miskin seseorang maka akan semakin kecil kemampuan menabungnya (saving). Jika savingturun maka investasi juga akan turun, sehingga kesempatan kerjapun akan turun. Inilah yang menyebabkan perturnbuhan dan distribusi sering bertentangan. Mernang mekanisrne pasar tidak ramah terhadap orang miskin, oleh karena itu mereka inilah yang langsung merasakan bila adanya perubahan harga.

#### **d. Kemiskinan**

Seseorang dikatakan miskin hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti nilai dan kebiasaan masyarakat yang dihormati. Konsumsi adalah sumber kesejahteraan dalam teori. Tidak mungkin untuk menikmati manfaat tanpa mengkonsumsi. Jika dernikian kesejahteraan relatif setiap orang diproyeksikan dari tingkat konsumsi mereka Secara umum ada beberapa jenis kemiskinan, yaitu (a) kemiskinan alamiah, yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam, (b) kemiskinan struktural, yaitu yang berhubungan dengan sifat kelangkaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sumber daya kaya tetapi dikuasai oleh orang lain sehingga yang empunya sumber daya tetap miskin. Gambar berikut menunjukkan tolok ukur kerniskinan. Tolok ukur kerniskinan antara lain seperti dikernukakan berikut ini.

##### **1.) Pengeluaran (Persentase Pendapatan) untuk Bahan Makanan**

Hal ini didasarkan pada teori survival, yaitu pada keadaan yang paling buruk orang akan tetap mernpertahankan hidup. Semakin tinggi persentase

pendapatan dibelanjakan untuk bahan makanan, maka semakin miskin individu/orang tersebut. Dan, sebaliknya semakin rendah persentase pendapatan dibelanjakan untuk bahan makanan, maka dikatakan bahwa individu/orang/masyarakat tersebut semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Konsep ini sangat mudah diterapkan dan skalanya skala rasio sehingga valid untuk suatu rentang tertentu saja. Kelemahan sistem ini adalah (a) adanya keragaman harga bahan pangan antarwilayah, oleh karena itu setiap Saat /waktu harus diboboti dengan indeks harga, dan (b) kesukaran menghitung pengeluaran bahan makanan, terutama di perdesaan, di mana bahan makanan tersebut diproduksi sendiri secara tradisional, untuk ini harus dihitung opportunity cost-nya.

## **2.) Rasio Barang Jasa (*Goods Service Ratio*)**

Pengeluaran manusia itu pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu barang dan jasa. Secara teoretis semakin tinggi kesejahteraan seseorang maka akan semakin besar konsumsi barang dan jasanya. Dengan demikian semakin besar rasio barang dan jasa. Kelemahan sistem ini adalah (a) memilih barang dan barangjasa itu tidak sederhana. Misalnya kain untuk sembahyang ini barang jasa (*goods service*) tetapi wujudnya adalah barang (*goods*), (b) Kesukaran dalam memisahkan konsumsi dan biaya produksi. misal membeli baju Korpri untuk ke kantor adalah biaya produksi, sedangkan membeli baju untuk di luar pekerjaan adalah konsumsi, (c) sukar membedakan konsumsi dan investasi. Misalnya sekolah konsumsi atau investasi, dan (d) adanya pola konsumsi yang spesifik, sehingga sukar untuk membandingkan

antarwilayah tersebut. Misal di Jawa Barat pengeluaran untuk pakaian tinggi, sedangkan di Jawa Tengah relatif kecil.

### **3.) Setara Nilai Beras**

Sistem ini dikembangkan oleh Sayogyo, yaitu jika pendapatan seseorang S 240kg beras/th/kapita (di perdesaan, dan S 360kg beras/th/kapita (di perkotaan) dikatakan miskin. Tahun 1986/1987, Teken menganjurkan angka di atas untuk diubah, karena aspirasi masyarakat perdesaan dan perkotaan telah berubah, yaitu 360kg beras/th/kapita (di perdesaan), dan 480kg beras/th/kapita (di perkotaan). Kelemahan sistem ini adalah (a) bahwa harga beras selalu disubsidi, (b) di beberapa daerah beras bukan makanan pokok, (c) harga antar musim sangatfluktuatif (Mahi, 2004).

### **e. Kelestarian Lingkungan Hidup**

Aspek lingkungan hidup menjadi sangat penting sejak tahun 1960 an, di mana dirasakan dengan pasti bahwa industri sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Secara umum jasa lingkungan hidup, sekurang-kurangnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu: (a) lingkungan hidup memberikan jasa daya asimilatif, yaitu kemampuan lingkungan hidup secara alamiah melakukan dekomposisi bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan inorganik, (b) menstabilkan ekosistem termasuk produktivitas dan efisiensi, (c) amenity resources, yaitu jasa keindahan, kenyamanan, keserasian, yang secara langsung memengaruhi konsumsi konsumen secara jelas. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti dikemukakan berikut ini.

1. *Public Goods*

Konsumsi public goods sangat spesifik, dan setiap orang selalu berfikir (dorongan untuk memanfaatkan *public goods*) mengapa tidak saya yang memanfaatkannya, karena bila tidak saya yang memanfaatkannya public goods tersebut tentu orang lain yang akan memanfaatkannya. Hal inilah yang disebut dengan dorongan yang bersifat *public goods*.

2. *Externality*

Externality adalah keadaan di mana kegiatan suatu aktor ekonomi dalam memproduksi, mendistribusikan, atau mengonsumsi suatu barang terjadi. Faktor ekonomi mempengaruhi fungsi produksi tetapi tidak melalui mekanisme pasar. Salah satu contohnya adalah di mana limbah pabrik tapioka dibuang ke sungai.

**2. Pembangunan Berkelanjutan**

Penggunaan sumber daya alam tidak dapat dihindari selama pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengubah kapasitas dan daya dukung lingkungan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat menyebabkan ketersediaan iahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara iahan yang tersedia tetap dan tidak dapat diubah, menambah beban lingkungan hidup. Alam semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan PC untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Oleh karena itu, eksploitasi sistematis lingkungan secara teratur dilakukan dengan berbagai alasan. Pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya manusia dan alam dengan menggabungkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya disebut

pembangunan berwawasan lingkungan. Kerusakan lingkungan diduga disebabkan oleh setidaknya dua faktor: laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED (World Commission on Environment and Development) berjudul "Our Common Future" (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefinisikan "Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pernerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*

2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Didasarkan pada gagasan pembangunan berkelanjutan, indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari bidang ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya.

### **3. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan keberlanjutan idealnya membutuhkan pendekatan untuk mencapai keberlanjutan dan kesinambungan berbagai aspek kehidupan, seperti ekologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan.

- a. Keberlanjutan Ekologis  
Untuk menjamin keberlanjutan ekologis diupayakan dengan cara: (a) memelihara Integritas tatanan lingkungan; (b) memelihara keanekaragaman hayati.
- b. Keberlanjutan Ekonomi Makro  
Efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran adalah tiga komponen utama keberlanjutan ekonomi makro. Kebijakan makro ekonomi dapat membantu mencapai hal ini, seperti reformasi fiskal, peningkatan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, reformasi pemerintahan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.
- c. Keberlanjutan Ekonomi Sektoral  
Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kegiatan ekonomi dilakukan. Pertama, sumber daya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus dianggap sebagai kapital yang dapat diperhitungkan dalam akuntansi ekonomi. Kedua, prinsip harga sumber daya alam melihat biaya ekstraksi, pemanfaatan, dan lingkungan.
- d. Keberlanjutan Sosial Budaya  
Keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup setiap orang adalah beberapa bentuk keberlanjutan sosial dan budaya yang paling jelas. Ada empat bentuk keberlanjutan sosial dan budaya yaitu:
  1. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.

2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut.
  3. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
- e. Keberlanjutan Politik
- Keberlanjutan politik berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pelaksanaan demokrasi juga harus memastikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab.
- f. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.
- Keamanan yang berkelanjutan mencakup menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan dari dalam dan luar yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan bangsa.

#### **4. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam pembangunan berkelanjutan, pendekatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penggunaan kapital saat sumber daya dan teknologi terbatas. Dengan mempertahankan kelestarian ekologi dan sosial, memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan melindungi semua orang, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Analisis biaya manfaat atau proyek pembangunan adalah salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan harus direncanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang. Selain itu, ada metode lain yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang berlebihan dan untuk menutupi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan sumber daya tersebut. Sasaran ekonomi pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi, kelestarian aset, dan efisiensi pembangunan sumber daya melalui pengelolaan yang ramah lingkungan. Dalam kasus ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi dan output tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Pandangan ekologis bergantung pada gagasan bahwa semua tindakan manusia akan mempengaruhi lingkungan di masa depan.

Tujuan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan terkait. Keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ada lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak stabil, pembangunan akan terhambat. Selain itu, pembangunan ekonomi yang mengabaikan efisiensi penggunaan sumber daya dan kelestarian alam akan menyebabkan kerusakan alam yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan juga untuk menilai dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun proses pembangunan yang berjalan sedikit ataupun banyak akan menimbulkan eksternalitas negatif di mana masyarakat yang akan merasakan akibat dari kerusakan tersebut. Masyarakatlah yang menanggung beban berupa biaya-biaya sosial yang harus ditanggung, baik oleh

masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang. Hal yang paling penting adalah bahwa pemahaman tentang pembangunan dimulai dengan melihat apakah pembangunan berhasil mengurangi kemiskinan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan penurunan sumber daya dan peningkatan biaya lingkungan. Langkah selanjutnya yang harus dipertimbangkan secara global adalah menemukan cara yang efisien untuk memecahkan masalah kemiskinan secara bersamaan tanpa membahayakan lingkungan atau mengurangi kualitas sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.

Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi, juga dikenal sebagai equity antar generasi, berarti bahwa ketika memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan, harus mempertimbangkan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan yang berfokus pada sumber daya alam yang dapat diganti, dan menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diganti serendah mungkin.
2. Safeguarding atau menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dan mencegah gangguan muncul di ekosistem untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi generasi berikutnya.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.

4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

## **5. Peran Tata Ruang dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan**

Terkait dengan pembangunan perkotaan, kota yang mengadopsi paradigma pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruangnya adalah suatu kota yang nyaman bagi orang-orang. Kota ini memiliki akses ekonomi dan sosial budaya yang luas dan memungkinkan setiap orang memenuhi kebutuhan dasar mereka, memenuhi kebutuhan interaksi sosial mereka, dan mendapatkan kedekatan dengan lingkungannya.

Rencana tata ruang adalah Suatu bentuk kebijakan publik yang dapat memengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan. Namun masih banyak masalah dan kendala dalam implementasinya dan menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Konflik yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah (public sector), pengusaha atau pengembang (private sector), profesional (expert), ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat, wakil masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain: antara sektor formal dan informal atau sektor modern dan tradisional di

perkotaan terjadi konflik yang sangat tajam; proyek 'urban renewal' sering diplesetkan sebagai 'urban removal'; fasilitas publik seperti taman kota harus bersaing untuk tetap eksis dengan bangunan komersial yang akan dibangun; serta bangunan bersejarah yang semakin menghilang berganti dengan bangunan modern dan minimalis karena alasan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, maka kota bukanlah menjadi tempat yang nyaman bagi warganya.

Terkait dengan pembangunan perkotaan, kota yang mengadopsi paradigma pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruangnya adalah suatu kota yang nyaman bagi orang-orang. Kota ini memiliki akses ekonomi dan sosial budaya yang luas dan memungkinkan setiap orang memenuhi kebutuhan dasar mereka, memenuhi kebutuhan interaksi sosial mereka, dan mendapatkan kedekatan dengan lingkungannya. Rencana tata ruang adalah jenis kebijakan pemerintah yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keberlanjutan pembangunan berkelanjutan, menurut Budihardjo (2005). Namun, masih ada banyak masalah dan hambatan yang menghalangi pelaksanaannya, yang menyebabkan banyak konflik kepentingan. Di Indonesia, konflik yang paling sering terjadi adalah antara pelaku pembangunan yang terdiri dari sektor publik (pemerintah), sektor swasta (pengusaha atau pengembang), profesional (profesional), ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat, perwakilan masyarakat, dan setiap lapisan masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain: konflik yang sangat tajam terjadi antara sektor perkotaan formal dan informal, atau modern dan tradisional. Proyek renovasi perkotaan sering dianggap sebagai pemindahan perkotaan, karena fasilitas publik seperti taman kota bersaing untuk tetap eksis di antara bangunan komersial yang akan

dibangun. Selain itu, karena masalah keuangan, bangunan bersejarah diganti dengan bangunan yang lebih kontemporer dan minimalis. Kota bukanlah tempat yang nyaman bagi penduduknya dalam situasi seperti ini. Kebijakan pembangunan berkelanjutan biasanya dipromosikan sebagai slogan yang menarik. Namun, dalam kenyataannya hal itu tidak benar.

Terkait dengan berbagai konflik tersebut, maka beberapa usulan yang diajukan Budihardjo (2005) untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang, antara lain:

1. Orientasi jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat inkremental, dengan wawasan pada pelaksanaan atau action oriented plan.
2. Penegakan mekanisme development control lengkap dengan sanksi (disinsentif) bagi berbagai jenis pelanggaran dan insentif untuk ketaatan pada peraturan.
3. Penataan ruang secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model advocacy, participatory planning dan over-the-board planning atau perencanaan lintas sektoral, sudah saatnya dilakukan secara konsekuen dan konsisten.
4. Perlu peningkatan kepekaan sosiokultural dari para penentu kebijakan dan para profesional (khususnya di bidang lingkungan binaan) melalui berbagai forum pertemuan/diskusi/ceramah/publikasi, baik secara formal maupun informal.
5. Perlu adanya perhatian yang lebih terhadap kekayaan khazanah lingkungan alam dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

6. Keunikan setempat dan kearifan lokal perlu diserap sebagai landasan dalam merencanakan dan membangun kota, agar kaidah *a city as a social work of art* dapat terejawantahkan dalam wujud kota yang memiliki jati diri. Fenomena globalisasi With local flavour harus dikembangkan untuk menangkal penyeragaman wajah kota dan tata ruang. Di samping enam usulan tersebut tentunya implementasi indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada keseimbangan pembangunan dalam sedikitnya 3 (tiga) Pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial harus menjadi dasar pertimbangan sejak awal disusunnya suatu produk rencana tata ruang kota/Wilayah.

# **BAB**

## **II**

### **KONSEP PEMBANGUNAN SEKTOR PUBLIK**

---

#### **A. Definisi Teori Pembangunan Sektor Publik**

Kata "pembangunan" mungkin terdengar familiar. Kata ini biasanya didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Meskipun demikian, kebanyakan orang menganggap pembangunan sebagai entitas fisik. Bahkan dalam komunitas kecil, pembangunan memiliki arti yang berbeda. Ini dapat dilihat dari papan peringatan yang sering kita lihat di tepi jalan: hati-hati ada pembangunan mall, jembatan, jalan raya, rumah ibadah, dan sebagainya. Bahkan, Seleo Sumardjan menggunakan kisah seorang penduduk miskin di sebuah kota kecil di luar Jakarta untuk menggambarkan makna pembangunan bagi masyarakat kecil yang unik itu. Saya pernah tinggal di Jakarta. Namun, saya harus mengungsi ke sini karena ada pembangunan (Arief Budiman, 1996).

Anggapan bahwa pembangunan modern Indonesia telah membawa banyak perubahan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan, diukur dengan ukuran fisik. Dibangun banyak fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, PDAM, dan lainnya, serta jalan raya yang lebar dan mulus. Selain itu, ada banyak sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang informasi.

Karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal fisik, kiranya penting bagi kita untuk mengubah makna pembangunan dari sudut pandang pertumbuhan kemajuan negara dalam modul ini. Meskipun pemahaman umum tentang pembangunan tidak salah. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang didefinisikan sebagai pembangunan, yang didefinisikan oleh suatu negara sebagai "pengembangan pencapaian kebudayaan sendiri" (Tjokrowinoto, 1996: 1). Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, dalam konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tercantum pada sila terakhir Pancasila.

Oleh karena itu, pembangunan sangat terkait dengan nilai dan seringkali merupakan gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (ideologi pembangunan). Oleh karena itu, para pakar, perencana pembangunan, dan perumuskebijakan selalu dihadapkan pada pilihan nilai, yang dimulai dengan pilihan epistemologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya dan dilanjutkan dengan derivasinya pada tingkat strategi, program, atau proyek.

Keadilan sosial adalah inti dari pemikiran pembangunan. Untuk mencapai hal ini, pembangunan memerlukan prosedur dan langkah-langkah yang diukur. Proses ini harus mencakup berbagai aspek: ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial.

#### a. Beberapa Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin yang paling kontroversial. Mungkin tidak ada bidang ilmu yang lebih tepat untuk menerapkan istilah "pembangunan". Sejauh ini, beberapa perspektif tentang pembangunan telah berkembang,

termasuk sosiologi klasik (seperti Durkheim, Weber, dan Marx), perspektif Marxis, modernisasi Rostow, dan strukturalisme bersama modernisasi. Ulasan awal tentang pembangunan sosial telah diperluas hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema utama yang membentuk pesannya. Dalam konteks ini, pembangunan dapat didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk membangun alternatif yang lebih luas yang dapat diterima secara hukum bagi setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi manusiawi mereka (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah adalah tema kedua. Ini dapat diartikan bahwa pembangunan harus berfokus pada keberagamandalam seluruh aspek kehidupan, dan mekanismenya memerlukan pembentukan kelembagaan dan hukum yang terpercaya, transparan, dan adil.

Secara umum, pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan sosial, atau rencana sosial, yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan untuk melakukan perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan adalah proses perbaikan terus-menerus masyarakat untuk meningkatkan atau meningkatkan kesejahteraan, dan terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Pendapatan per kapita bukan satu-satunya indikator pembangunan; perlu ditambahkan peningkatan distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran. Di bawah ini adalah beberapa definisi pembangunan yang diberikan oleh para pakar :

- 1) Easton (1985) Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari 3 unsur pertama adanya input yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.
- 2) Emil salim (sebelumnya, sebagai menteri negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup, 1978-1983) Pembangunan bersinambungan sebagai suatu proses perubahan yang didalamnya eksplotasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembanganteknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.
- 3) Johan galtung Upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan social
- 4) Bintoro Tjokroamidjojo Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karenameliputi berbagai dimensi untuk mengusaha kemajuan dalam kesejahteraanekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.
- 5) Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004 Upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warna negara untuk

memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

- 6) Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakakusumah, 2005 Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.
- 7) Siagan (1994) Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)
- 8) Ginanjar Kartasasmita (1994) Suatu proses perubahan ke arah lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
- 9) Deddy T. Tikson (2005) Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

## **B. Organisasi Sektor Publik**

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah tujuan. Semua organisasi memiliki tujuan yang harus dicapai, dan manajemen yang efektif diperlukan untuk mencapainya. Tujuan perusahaan dapat kualitatif atau kuantitatif, dan masing-masing dapat dibagi menjadi tujuan finansial dan non-finansial. Menurut Mahsun (2011)

Organisasi biasanya hanya terdiri dari dua kategori: organisasi yang menghasilkan keuntungan dan organisasi yang tidak menghasilkan keuntungan. Namun, organisasi sektor publik diklasifikasikan sebagai non-profit karena sulit untuk membedakan organisasi pure-profit dan quasi-profit, serta pure-nonprofit dan quasi-nonprofit. Menurut Mahsun

(2011), Ada banyak definisi yang berbeda untuk istilah "sektor publik". Ini karena ruang publik yang luas, sehingga setiap bidang ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki perspektif dan definisi mereka sendiri.

Terlepas dari sejarah, sektor publik ini muncul. Pada awalnya, sektor publik muncul sebagai akibat dari kebutuhan kolektif terhadap layanan dan barang tertentu. Untuk mencegah alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil, ada peraturan pengalokasian dan pendistribusiannya, juga dikenal sebagai pengurusan. Selanjutnya, anggota masyarakat membayar sejumlah upeti, atau pajak, untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum yang dilakukan oleh pengurusan (Mahsun et al., 2011:5).

Menurut Mahsun (2011:6), sektor publik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Barang publik dimaksud dalam pemahaman sektor publik tidak hanya barang fisik tetapi juga pelayanan publik. Barang publik juga diartikan sebagai pelayanan publik dalam bab ini. Menurut beberapa literatur, barang publik dapat dimasukkan ke dalam dua kategori :

- a. Barang publik murni (pure public goods), dimana pengadaan barang publik murni ini dibiayai dari pajak. Dengan begitu terdapat empat karakteristik barang publik murni, sebagai berikut:
  - 1) *Non rivalry in consumption*, maksudnya barang publik merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam mengkonsumsinya.

- 2) *Non exclusive*, maksudnya penyediaan barang publik tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang eksklusif antar individu dalam masyarakat, semua orang memiliki hak yang sama untuk mengkonsumsinya.
  - 3) *Low excludability*, maksudnya penyedia atau konsumen suatu barang tidak bisa menghalangi atau mengecualikan orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut.
  - 4) *Low competitive*, maksudnya antar penyedia barang publik tidak saling bersaing secara ketat, hal ini karena keberadaan: barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama.
- b. Barang semi publik (*quasi public goods*) atau biasa juga disebut *common pool goods*, yaitu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang atau jasa ini sebetulnya mempunyai daya saing yang tinggi tetapi non excludable, maksudnya penyedia atau konsumen barang atau pelayanan publik ini tidak bisa menghalangi/mengecualikan orang lain untuk menggunakan serta memperoleh manfaat dari barang tersebut, meskipun konsumsi seseorang akan mengurangi keberadaan barang atau jasa tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, sektor publik tidak dapat dipisahkan dari barang publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sektor publik harus ada di

masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh Jones (1993) dalam Mahsun (2011), terdapat tiga peran utama yang dimainkan oleh sektor publik dalam masyarakat, yaitu :

- a. *Regulatory role*, sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa saja sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu/mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.
- b. *Enabling role*, adalah peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat. Implikasinya sektor publik diberi kewenangan untuk penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum.
- c. *Direct provision of goods and services*, karena semakin kompleksnya area yang harus di 'cover' oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat.

### **C. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik**

Adapun ciri-ciri dari organisasi sektor publik diantaranya:

- a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
- b. Dimiliki secara kolektif oleh public.
- c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.
- d. Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif.

### **D. Komponen Lingkungan Yang Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi:

- a. Faktor ekonomi meliputi antara lain:
  - 1) Pertumbuhan ekonomi
  - 2) Tingkat inflasi
  - 3) Nilai tukar mata uang
  - 4) Infrastruktur
  - 5) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- b. Faktor politik meliputi antara lain:
  - 1) Hubungan negara dan masyarakat
  - 2) Legitimasi pemerintah
  - 3) Tipe rezim yang berkuasa
  - 4) Ideologi Negara
  - 5) Elit politik dan massa
  - 6) Jaringan Internasional
  - 7) Kelembagaan
- c. Faktor kultural meliputi antara lain:
  - 1) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
  - 2) Sistem nilai di masyarakat
  - 3) Historis

- 4) Sosiologi masyarakat
  - 5) Karakteristik masyarakat
  - 6) Tingkat pendidikan
- d. Faktor demografi meliputi antara lain:
- 1) Pertumbuhan penduduk
  - 2) Struktur usia penduduk
  - 3) Migrasi
  - 4) Tingkat kesehatan

### **E. Public Goods (Barang Publik)**

"Publik" berasal dari istilah Latin "publicus", yang berarti dewasa, dan dalam konteks ini berarti gagasan yang berkaitan dengan orang-orang. Dalam bahasa Inggris, "publik" berarti milik bangsa, negara, atau masyarakat secara keseluruhan, atau dipelihara oleh atau digunakan oleh orang-orang atau masyarakat secara keseluruhan. "Privat", yang berasal dari bahasa Latin "privare", yang berarti mencabut atau menghilangkan, dan "private" dalam bahasa Inggris berarti tidak tersedia untuk penggunaan umum, tidak peduli negaranya, atau khusus untuk individu tertentu, sehingga "publik" menyampaikan gagasan bahwa apa yang publik tersedia untuk semua orang. Giritono, 2012: 54).

Dalam bukunya, Guritno M (2012:54) menjelaskan bahwa kata "Baik" sebagai kata sifat berasal dari bahasa Anglo-Saxon "goo", yang diucapkan dengan memanjangkan "o" seperti "goad" dan berarti menyenangkan atau sesuai. Jika digunakan sebagai kata benda, itu mengacu pada barang dan properti pribadi. Kata "baik" memiliki konotasi positif dan menggambarkan manfaat. Jika digabungkan dengan "barang publik", "barang publik" menggambarkan manfaat yang tersedia bagi semua orang atau masyarakat secara keseluruhan.

Menurut definisi sederhana, "barang publik" adalah barang atau layanan yang diberikan oleh sektor publik. Menurut definisi abstrak, "barang publik" adalah barang dan jasa yang tidak dapat dibandingkan dalam konsumsi dan tidak termasuk. (Giritono, M. 2012: 56).

a. Rivalry (Persaingan)

Ketika sebuah barang dianggap sebagai "rivalitas dalam konsumsi", hal itu berarti bahwa tindakan orang yang mengonsumsi barang tersebut dapat mencegah orang lain untuk menikmati barang yang sama.

b. Excludability

Ketika suatu barang memiliki kemampuan untuk menghalangi orang lain untuk menikmati barang tersebut kecuali mereka yang membayarnya, barang tersebut dianggap "excludable", sedangkan jika barang tersebut tidak mampu menghalangi orang lain yang tidak membayar untuk menikmatinya.

Barang publik didefinisikan sebagai barang yang memiliki karakteristik "nonrival" dan "nonexcludable." Selain dapat memperjelas definisi barang publik, konsep-konsep ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan barang publik dengan barang lain. Para ekonom menganggap "rivalitas" dan "excludability" sebagai variabel yang harus dipilih. Sebuah barang dapat dianggap sebagai "rival" atau "nonrival", serta "excludable" atau "nonexcludable".

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (2012:57), barang publik adalah barang yang tidak dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin tidak memerlukan biaya untuk memperolehnya. Barang publik juga didefinisikan sebagai barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi barang lain. Sehingga barang publik dapat dinikmati oleh semua orang, itu dibuat untuk masyarakat umum.

Menurut Guritno M. (2012:59), barang publik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari barang lain. Berikut adalah beberapa karakteristik tersebut:

a. Non Exclusive

Semua orang, baik yang membayar atau tidak membayar untuk mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, tetap memperoleh manfaat apabila barang publik tersedia; dengan kata lain, tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut.

b. Non Rivalry

Dalam penggunaan barang publik, setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Penggunaan satu konsumen terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut juga.

c. Join Consumption

Barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan (join consumption) tanpa saling meniadakan manfaat (rivalitas) antara pengguna yang satu dan lainnya. Sedangkan untuk barang atau jasa yang hanya dapat dimanfaatkan oleh seseorang dan orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, maka barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki tingkat join consumption yang rendah.

- d. Eksternalitas  
Jika seseorang mendapatkan dampak atau efek tertentu di luar barang atau jasa yang tidak terkait langsung dengan mekanisme pasar, itu disebut "eksternalitas". Efek samping dari tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain dapat berupa dampak yang menguntungkan atau merugikan.
- e. Indivisible  
Dengan kata lain, tidak dapat dibagi-bagi dalam satuan unit yang biasa untuk dilevely.
- f. Marginal cost = 0  
Artinya, tidak ada biaya tambahan untuk membuat satu unit output tambahan.

Menurut Guritno M. (2012:73) terdapat beberapa teori barang publik yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Teori Pigou  
Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal konsumen akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal konsumen akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah.
- b. Teori Bowen  
Teori Bowen didasarkan pada teori harga sama, yang digunakan untuk menentukan harga barang swasta. Menurut Bowen, barang publik adalah barang di mana pengecualian tidak dapat didefinisikan. Oleh karena itu, sekali suatu barang menjadi mudah diakses oleh publik, tidak ada yang dapat dihindari untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Jadi, menurut Bowen, jumlah barang publik yang dikonsumsi oleh individu A dan B sama.

- c. Teori Erick Lindahl  
Teori Lindahl hampir sama dengan teori Bowen, tetapi pembayaran setiap pelanggan diwakili oleh presentase dari biaya total penyediaan barang publik daripada harga absolut.
- d. Teori Samuelson  
Ada barang yang memiliki dua sifat: non-exclusionary dan non-rivalry, menurut Samuelson. tidak berarti perekonomian tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat atau kondisi Pareto Ideal.
- e. Teori Anggaran  
Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu membayar jumlah yang sama untuk menggunakan barang-barang publik—sama dengan sistem harga yang berlaku untuk barang-barang swasta.

## **F. Layanan dan Kebutuhan Pengukuran Sektor Publik**

Komisi PBB di dalam prioritas pembangunan sosial (UN Expert Group Meeting, 2003:36-42) menerangkan, bahwa di dalam meningkatkan keefektifan sektor publik maka pemerintah seharusnya:

- a. Menentukan sumber-sumber daya apa yang diperlukan di dalam menyediakan tingkat- tingkat dasar layanan-layanan yang diberikan dengan menguji cara-cara keuangan yang lebih baik terhadap pembelanjannya.
- b. Memperhitungkan kesalingtergantungan dari pembelanjaan pembangunan sosial (seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan dasar, serta mendorong keefektifan pencapaiannya) sebagai sesuatu yang kritikal melalui pembangunan area-area dan program- program sosial secara bersama- sama dan terpadu.

- c. Memastikan transparansi dan akuntabilitas publik dalam anggaran dan proses formulasinya, termasuk pula di dalam hal ini adalah 'provisions' yang sesuai bagi warga, komunikasi yang jelas, informasi yang lengkap tentang pendapatan (revenues), dan keterbatasan-keterbatasan keuangan atau fiskal.
- d. Menentukan sasaran- sasaran tuju dan prioritas yang jelas, dengan selalu mencoba melindungi kepentingan-kepentingan terbaik bagi orang-orang miskin dan sektor-sektor masyarakat marjinal, melalui rancangan anggaran yang baik terhadap area- area kerja yang dibuat beserta keuntungan- keuntungannya.
- e. Memberikan prioritas terhadap anggaran pembelanjaan yang ditujukan bagi meningkatkan kesejahteraan publik, mempromosikan kapasitas pembangunan, dsb.
- f. Mengambil langkah- langkah reformasi terhadap sistem alokasi anggaran dengan menghindari atau meminimalkan pembiayaan proyek- proyek dan program- program sosial terhadap usahausaha untuk memakmurkan dan menguntungkan diri (pork-barrel in character or selfish), serta motif- motif kesempatan dalam politik (opportunistic political motives).
- g. Memberikan perhatian- perhatian khusus terhadap sesuatu yang diperlukan, agar dana- dana publik yang dialokasikan terhadap sasaransasaran khusus dapat dipastikan keberadaannya melalui sistem monitoring dan evaluasi.
- h. Memastikan pengukuran terhadap anggaran pemerintahan tidak menciptakan kondisi ekonomi atau efek- efek sebaliknya, seperti inflasi, krisis pembayaran berimbang, pertumbuhan yang rendah, serta penuh sesaknya investasi swasta yang dapat merendahkan pencapaian sasaran- sasaran tuju sosial.

- i. Mengimplementasikan sistem pengukuran dan pembangunan untuk menghilangkan temboktembok penghalang terhadap penyediaan layanan dan kinerja.
- j. Memberikan perhatian dan pertimbangan terhadap pemilihan waktu yang tepat, ketika menyiapkan perencanaan- perencanaan dan program-program aktifitas-aktifitas pembangunan di dalam kerangka jangka pendek, menengah, dan panjang.
- k. Merancang harga-harga yang seimbang terhadap layanan-layanan publik untuk ditetapkan melalui kombinasi harga yang diperlukan di dalam pencapaiannya, yaitu berupa pembelanjaan yang sesuai terhadap orang- orang yang lebih luas.
- l. Merancang kebijakan- kebijakan kerjasama (jika dimungkinkan dan sesuai) bersama- sama dengan sektor-sektor swasta, di mana perancangan dan penciptaan institusi- institusinya adalah bersandarkan pada layanan- layanan publik terhadap populasi.

Namun, karena sistem peningkatan kinerja manajemen sektor layanan publik hanya berfokus pada instrumen pengendalian yang hanya mengukur hasil organisasi, dampak dari sistem tersebut tidak atau kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengukuran yang dilakukan dengan cara ini tidak mempertimbangkan elemen-elemen berikut :

- a. Cara pandang pengelolaan organisasi publik. Heywood et.al. (2007:2) mengatakan, bahwa seharusnya cara pandang tersebut perlu dilakukan melalui sudut institusional dan individual.
- b. Kompleksitas tantangan terhadap strategi yang dihadapi para agensi layanan publik. Di dalam hal ini

Ulrich (1998:126-127) menyarankan, bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi- organisasi publik adalah membangun kemampuan-kemampuan baru dan pembangunannya tersebut perlu dilakukan secara kolektif. Di mana kemampuan- kemampuan tersebut adalah ditujukan di dalam menghadapi globalisasi, keuntungan melalui pertumbuhan ekonomi dan sosial, teknologi, kapital intelektual, dan perubahan.

Padahal, tujuan dan pencapaian yang diharapkan dari pengukuran kinerja sektor publik adalah dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Menjadikan suatu organisasi berkinerja tinggi. Di sini Eiarnienė et al. (2006:62) mengatakan, bahwa caranya adalah melalui visi, misi, dan sasaran tuju (obyektif) yang diarahkan terhadap peningkatan berkesinambungan, pengutamaan terhadap pekerja-pekerja yang berkemampuan luas, kelenturan dan perataan terhadap birokrasi untuk menggantikan hirarki organisasi yang tinggi dan kaku, dan pengayaan kerja (job enrichment).
- b. Mempromosikan pembelajaran dan pembangunan badan- badan layanan publik secara berkesinambungan pada semua tingkatan organisasi. Radnor et al. (2006:4-76) dalam hal ini mengusulkan, bahwa caranya adalah dengan pengendalian manajerial yang dikurangkan melalui pengujian otoritas formal terhadap faktor-faktor kritikal keberhasilan (critical success factors) yang harus dicapai. Faktor-faktor tersebut adalah berupa pembangunan organisasi dan kesiapannya, budaya organisasi dan rasa kepemilikan, komitmen manajemen dan kapabilitasnya, sumber-sumber daya yang sepadan

terhadap kemampuan-kemampuan internal dan kompetensi, proses komunikasi yang jelas dan keterikatan, penyebaran strategi dan pengelolaan dari aktifitas-aktifitas peningkatan berkesinambungan (continuous improvement), dukungan eksternal, kerjasama, masa dan waktu.

- c. Mengarahkan organisasi kepada suatu pengenalan terhadap sistem- sistem pengukuran proses yang disejajarkan terhadap sasaran organisasi. Oleh karenanya, di dalam hal ini diperlukan identifikasi terhadap pelanggan melalui rantai pasokan dan umpan balik agar pengukuran kinerjanya menjadi lebih efektif (Kaplan & Norton, 1992:72-79; Neely et. al, 2000:1119-1122).
- d. Meningkatkan dampak dari rantai pasokan melalui strategi transformasi organisasi. Di sini, peningkatan proses perlu dilakukan melalui elemen-elemen pengukuran kinerja terhadap perangkat-perangkat organisasi dan kemampuan-kemampuan yang ada, untuk diletakkan sebagai rujukan atau acuan terhadap derajat kesuksesan kinerja organisasi yang diperlukan di masa mendatang.

## **G. Hambatan-hambatan Pada Pembangunan Sektor Publik**

Kualitas hidup yang lebih baik memang membutuhkan pendapatan yang tinggi. Namun, sepertinya pendapatan bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kesejahteraan. Pendidikan, peningkatan standar kesehatan, nutrisi, pemberantasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya adalah masalah lain yang

tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa apa yang disebut sebagai "kehidupan yang lebih baik" sangat berkaitan dan harus melibatkan nilai-nilai dan pengukuran nilai. Akibatnya, dalam istilah pembangunan, ada pengukuran nilai tentang apa yang baik (pembangunan) dan apa yang buruk (keterbelakangan). Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa definisi "pembangunan" berbeda untuk setiap individu.

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang telah ada sejak lama. Pada masa lalu, masyarakat biasanya miskin karena kekurangan makanan, tetapi karena kekurangan kemudahan atau materi. Mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan lainnya yang tersedia dalam kehidupan modern. Kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya menyerang negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Di penghujung tahun 1700-an, ketika revolusi industri muncul di Eropa, Inggris mengalami kemiskinan. Pada masa itu, kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga kerja pabrik yang sebelumnya bekerja sebagai petani dengan upah yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli sesuatu. Mereka biasanya tinggal di permukiman kumuh yang rentan terhadap masalah sosial lainnya seperti prostitusi, kejahatan, dan pengangguran.

Sebagai negara maju, Amerika Serikat juga menghadapi kemiskinan, terutama selama depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat adalah negara terkaya dan adi daya di

dunia. Sebagian besar warganya hidup dalam tingkat kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah membantu banyak negara. Meskipun demikian, tercatat bahwa 32 juta orang, atau seperenam dari populasinya, tergolong miskin.

b. Pembangunan Kelautan.

Bidang-bidang seperti pertambangan, pariwisata bahari, perikanan, ekonomi masyarakat pesisir, transportasi laut, dan industri maritim adalah masalah strategis dalam pembangunan kelautan. Tentu saja, bidang-bidang yang disebutkan di atas dapat dikombinasikan dengan masalah strategis lainnya di bidang kelautan, seperti bioteknologi; perlindungan sumber daya kelautan, termasuk sumber daya warisan dan pusaka yang terendam; terumbu karang dari berbagai spesies laut; dan keamanan dan pengamanan laut. Di bagian akhir makalahnya, penyaji memberikan pedoman dan saran untuk kebijakan pembangunan kelautan Indonesia. Masalah pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999) harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan konvensi internasional karena pergeseran pembangunan kelautan dari sistem sentralistik ke desentralisasi. Pemerintah pusat seharusnya bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab negara sebagai pihak kontrak dalam konvensi internasional yang penting dan strategis. Pemerintah pusat seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan navigasi di laut dan perairan pelabuhan, karena hal itu berhubungan dengan keselamatan manusia dan harta benda di laut,

pengecanaan dan pengaturan pencemaran laut, dan pengawasan sistem sertifikasi pelaut.

c. Pendekatan Ekosistem dalam Otonomi Daerah.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai beban pembangunan. Kesuksesan suatu negara dalam pembangunan bergantung pada partisipasi dan partisipasi masyarakatnya. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat. Sudah wajar bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Di era otonomi saat ini, setiap daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan potensinya sendiri. Sekarang masalahnya adalah bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensinya untuk mendukung pembangunan. Sebenarnya, masyarakat adalah potensi yang paling penting; namun, bagaimana masyarakat diberdayakan, adalah masalah lain yang harus diselesaikan.

Partisipasi masyarakat adalah bagian dari proses pengambilan keputusan demokratis di mana orang memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan publik. Kekuasaan masyarakat, atau kekuasaan rakyat, didefinisikan sebagai partisipasi masyarakat. Ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, yang memungkinkan masyarakat yang kurang beruntung berpartisipasi secara aktif dalam proses ekonomi dan politik. Partisipasi masyarakat juga merupakan strategi, dalam hal ini masyarakat miskin ikut terlibat dan menentukan bagaimana pemberian informasi, tujuan, dan kebijakan dibuat, pelaksanaan program, dan keuntungan seperti kontrak dan perlindungan.

Untuk pembangunan suatu masyarakat, ada beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan ekosistem (Alchin & Decharin, 1979). Pendekatan ini didasarkan pada beberapa asumsi yang ada tentang pembangunan masyarakat. Ini adalah asumsi tersebut.

- 1) Masyarakat didefinisikan sebagai suatu “tempat” di mana keputusan-keputusan dapat diambil dan usaha-usaha dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan Pembangunan.
- 2) Pembangunan masyarakat dipertimbangkan dengan adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi, tujuan, rencana, dan perilaku masyarakat.
- 3) Tujuan utama dari pembangunan masyarakat adalah meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat yang secara naluri sudah ditentukan (hasrat, keinginan, dan harapan).

Informasi merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan masyarakat. Informasi tersebut meliputi:

- 1) jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia;
- 2) tujuan-tujuan untuk meningkatkan persiapan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya;
- 3) rencana saat ini dan yang akan datang, serta kegiatan-kegiatan untuk memperoleh, menyiapkan, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya.
- 4) Sebagai agen perubahan (agent of change), masyarakat berada dalam suatu proses perencanaan dan kegiatan untuk memperkenalkan ide-ide yang mempengaruhi rencana orang-orang dan organisasi di dalam masyarakat, pada saat ini dan yang akan datang.

- 5) Partisipasi para pemimpin dan warga negara dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam merencanakan serta menyatakan bahwa program pembangunan adalah hal yang mendasar.

## **H. Pembangunan Lingkungan**

Sejak tahun 1950-an, masalah lingkungan telah menarik perhatian politisi, masyarakat umum, dan ilmuwan karena banyaknya korban jiwa dan pencemaran lingkungan.

Beberapa kasus lingkungan yang menewaskan orang, seperti pencemaran Jepang pada akhir tahun 1950 yang menyebabkan penyakit mengerikan yang disebut penyakit itai-itai. Daerah yang berjarak tiga kilometer dari sungai Jintsu tercemar oleh Kadmium (Cd) dari limbah pertambangan seng (Zn). Studi menunjukkan bahwa kadar Cd dalam beras di wilayah yang mendapat pengairan dari sungai itu sepuluh kali lebih tinggi daripada di wilayah lain. Penduduk di sekitar Teluk Minamata, Jepang, meninggal karena penyakit neurologik pada tahun 1953. Air raksa (Hg) di limbah pabrik kimia adalah penyebab penyakit ini, menurut penelitian. Penyakit Minamata adalah penyakit keracunan yang disebabkan oleh air yang dikonsumsi oleh manusia yang mencapai ambang batas keracunan.

Pembentukan WCED (World Commission on Environment and Development) oleh PBB pada tahun 1983 memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengembangkan perspektif lingkungan untuk pembangunan di semua bidang. WCED menggunakan enam (enam) elemen untuk menangani lingkungan dan pembangunan. Mereka adalah berkelanjutan, keterkaitan, pemerataan, sekuriti dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi, dan kerja sama

internasional. Gagasan pembangunan berkelanjutan telah ditanamkan dalam laporan WCED tahun 1987, "Hari Depan Kita Bersama" (Our Common Future).

Peran LSM internasional, seperti European Communitis (EC), OECD, IUCN, atau Association of Southeast Asian Nations, sangat penting dalam sejarah lingkungan hidup. Beberapa LSM internasional seperti WWF, Program TNC Indonesia, WEC, OISCA, AWB, CUSO, FWZS, ICBP, Sticthing FACE, Conservation International, dan Care International, semuanya terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

# **BAB**

## **III**

### **KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN PARIWISATA**

---

#### **A. Pengembangan Destinasi Wisata**

##### **1. Pengertian Pariwisata**

Pada abad ke-18, terutama setelah Revolusi Industri di Inggris, istilah "pariwisata" baru muncul. Istilah "pariwisata" berasal dari kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas yang mengubah tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggal sehari-harinya dengan suatu alasan selain melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan (Muljadi, 2012:8).

Pariwisata adalah perjalanan singkat individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dalam upaya mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam konteks sosial, budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat dalam Kurniansah, 2014:11).

Pariwisata adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mencari kepuasan yang berbeda dengan apa yang dialami orang saat mendapatkan pekerjaan tetap (Wahab dalam Kurniansah, 2014:12).

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk menikmati, mengetahui, memperbaiki kesehatan, berolahraga atau bersantai, menyelesaikan tugas, dan lain-lain. Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan sementara individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dalam upaya mencari keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan sosial, budaya, alam, dan

intelektual. Jika suatu perjalanan memenuhi tiga persyaratan, itu akan dianggap sebagai perjalanan wisata. Mereka adalah sementara, sukarela (voluntary), tidak terjadi karena paksaan, dan tidak bekerja yang menghasilkan upah (Spillane dalam Siallagan, 2011:4).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang terdiri dari 17 bab dan 70 pasal, dan mengatur delapan hal, sebagai tanggapan atas pertumbuhan sektor pariwisata global.

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- e. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Berpariwisata sebenarnya adalah suatu perjalanan singkat dari satu tempat ke tempat lain. Banyak kepentingan mendorongnya untuk pergi. Ini termasuk kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, dan ingin tahu atau belajar (Suwantoro dalam Kurniawan, 2015:5).

Menurut Pillane (2015:55), pariwisata adalah perjalanan sementara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dalam upaya mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek alam, sosial, budaya, dan intelektual.

Menurut World Tourism Organization (WTO), pariwisata adalah ketika seseorang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa secara terus menerus untuk tujuan bisnis, kesenangan, atau tujuan lainnya (Pitana dalam Wahid, 2015:57).

Menurut Yoeti dalam Anindita (2015:14), pariwisata adalah suatu tindakan manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian baik di dalam

negeri maupun di luar negeri. Ini termasuk menetap di negara lain untuk sementara waktu untuk mencari kepuasan yang berbeda dengan apa yang mereka alami sebelum menemukan pekerjaan tetap.

Menurut Wahab manfaat pariwisata dalam pembangunan ialah :

- a. Pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam.
- b. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sector ekonomi nasional misalnya:
  - 1) Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan terus pembangunan dan pembaharuan fasilitas wisata, prasarana dan suprasarana pariwisata.
  - 2) Menggugah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata lainnya : transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok, dll) yang memerlukan perluasan industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan.
  - 3) Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian.
  - 4) Memperluas pasar barang-barang lokal.
  - 5) Menunjang pendapatan Negara dengan valuta asing sehingga mengurangi defisit di dalam neraca pembayaran dan dengan demikian memajukan perekonomian nasional.
  - 6) Memberi dampak positif pada tenaga kerja di Negara itu, karena pariwisata memperluas lapangan kerja baru.

- 7) Membantu pembangunan daerah-daerah terpencil dalam suatu Negara jika daerah itu memiliki daya tarik pariwisata.
- c. Pariwisata internasional sangat berguna sebagai sarana. Untuk meningkatkan saling pengertian internasional dan sebagai penenang dalam ketegangan-ketegangan politik.
- d. Pariwisata juga berperan meningkatkan kesehatan. Pergantian tepat dan iklim serta menjauhkan diri dari segala kehidupan rutin sehari-hari, semua ini akan menambah daya tahan dan sangat menurunkan ketegangan syaraf.

Obyek wisata dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, keunikan, dan keunggulan yang berasal dari keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan produk buatan manusia yang menjadi tujuan atau tujuan kunjungan wisatawan (Ridwan, 2012:62).

Objektif wisata adalah sesuatu yang menarik bagi pengunjung, termasuk karya manusia, gaya hidup, seni budaya, sejarah negara, dan keadaan alam (Fandeli dalam Asriandy, 2016:21).

Obyek wisata adalah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa objek alam seperti gunung, danau, sungai, panatai, laut, atau objek bangunan seperti museum, benteng, peninggalan sejarah, dan lain-lain (Pendit dalam Any Safary, 2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, termasuk pembangunan, pengelolaan, dan pembuatan objek baru.

## 2. Kebijakan dan Strategi Pariwisata

Kebijakan, juga dikenal sebagai "*policy*", merupakan arahan atau tuntutan untuk melakukan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah ini menuntun para pelaksana, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, untuk mewujudkan harapan tersebut. Kebijakan didefinisikan sebagai berikut oleh Richardson dan Fluker (2004:184) dan Dowling dan Fennell (2003:5), yang dikutip oleh Pitana (2009:106) dalam Wahid (2015:97):

*"Police is a course of action adopted and pursued by a government, expressed as a broad statement of general intent which guides the actions of public servants and others in carrying out the government's wishes"* (Richardson dan Fluker, 2004:184 dalam Wahid 2015:97)

*"Police are the plan of action adopted or purposed by governments or businesses and so on whereas strategies represent the steps to achieve them"* (Dowling dan Fennell, 2003:5) dalam Wahid (2015:97).

Istilah kebijakan (*policy*) dan perencanaan (*planning*) berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan-pengambilan keputusan pelaksanaan.

Menurut Fennell (1999:132) dalam Wahid (2015:98), dalam pengertian sederhana, kebijakan pariwisata merupakan :

*"...the identification of a series of goals and objectives which help an agency-usually a governmental one-in the process of planning the tourism industry"* (Pitana, 2009:106)

Namun menurut Akehurst (1992, dalam Fannel, 1999:133), kebijakan pariwisata jauh lebih detail daripada itu, yaitu sebagai berikut:

*"A strategy for development of the tourism sector...that establishes objectives and guidelines as a basis for what needs to be done.this means identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in a community context the roles of national governments, national tourist organization, lokal governments, and private sector businesses; establishing possible co-ordination and implementation of agreed programmes to solve identified problems, with monitoring and evaluation of these programs"* (Pitana, 2009:107) dalam Wahid 2015:99)

Adapun kebijakan pengembangan pariwisata menurut Youti (1991) dalam Wahab (2015:128) terdiri dari:

**a. Kebijakan Pokok**

- 1) Mawadahi, membangun dan juga mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi daripada sebagai fasilitator regulator yang bisa menjadi pengembangan pariwisata.
- 3) Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan seorang dalam mengembangkan kawasan wisata.
- 4) Mengantarakan kerjasama pariwisata antar daerah dan juga dunia usaha

**b. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata**

- 1) Memberikan arahan yang jelas agar bisa menjadi pengembangan pariwisata berdasarkan Karakteristik keruangana melalui zonasi pengembangan.

- 2) Untuk kemudahan pembangunan dan pengolahan yang perlu dilakukan adalah pengelompokan obyek daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan agar mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata.
- 3) Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan juga daya tarik wisata.

**c. Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata**

- 1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek pemanfaatan dan penegndalian yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus sesuai dengan dasar-dasar pada sistem perencanaan.
- 2) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan dasar pendekatan pembangunan Satuan Kawaan Wisata dengan nuansa nilai agama, budaya estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat.
- 3) Penegmbangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan juga wisata petualangan.

**d. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata**

- 1) Menyiapkan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata.

- 2) Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata
- 3) Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komunikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Menarik investor untuk membangun akomodasi dan juga fasilitas penunjang lainnya.

Perumusan Bryson (dalam Wahid, 2015) suatu strategi yang efektif itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- a. Strategi secara teknis harus dapat dijalankan.
- b. Strategi secara politis harus dapat diterima oleh para key stakeholder.
- c. Strategi harus sesuai dengan filosofi dari nilai-nilai organisasi.
- d. Strategi harus sesuai dengan isu strategis yang hendak dipecahkan. Promosi mempunyai beberapa tujuan dalam menyampaikan informasi dan mencapai konsumen. Menurut Moriarty (2011: 608), tujuan promosi antara lain sebagai berikut: 1) promosi bertujuan untuk peluncuran produk baru dan salah satu cara mengajak orang untuk mencoba atau membeli suatu produk. 2) promosi dapat menginformasikan kepada konsumen yang tidak tahu mengenai brand tersebut menjadi mengeralnya, lalu mencoba dan mengajak mereka untuk membeli kembali. 3) promosi dapat mendorong produk melalui saluran distribusi dan menciptakan citra yang positif dikalangan para pembeli dan penjual. 4) promosi dapat membangun brand dan memperkuat citra dan pesan iklan yang dibutuhkan. 5) promosi tidak dapat menciptakan brand suatu produk, mengubah sikap negatif produk, mengatasi masalah produk atau mereposisi brand.

### 3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan objek wisata adalah usaha untuk meningkatkan atau memajukan objek wisata untuk menjadi lebih baik dan lebih menarik bagi wisatawan, baik dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya.

Pengembangan pariwisata berarti lebih banyak wisatawan datang ke tempat wisata, tinggal lebih lama, dan mengeluarkan lebih banyak uang di sana. Ini dapat meningkatkan devisa negara bagi wisatawan asing dan pendapatan lokal bagi wisatawan lokal. Tujuan lain adalah untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya lokal di daerah pariwisata. Jadi, orang-orang di sekitarnya juga bisa merasakan manfaatnya.

Empat prinsip utama harus membangun industri pariwisata (Sobari dalam Anindita, 2015):

- a. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
- b. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
- c. Kelangsungan ekonomi. yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

- d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus didukung oleh rencana yang matang dan mencakup tiga aspek penting: industri pariwisata, daya dukung lingkungan, yang terdiri dari sumber daya alam, dan masyarakat lokal dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup.

Untuk mengembangkan daya tarik atau atraksi wisata yang potensial, suatu tempat harus memiliki daya tarik alami yang sudah ada sejak awal, serta daya tarik buatan manusia. Menurut Santoso dalam Kurniawan (2015:51), komponen pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

#### **a. Atraksi**

Daya tarik dapat berasal dari hal-hal alam seperti keindahan panorama, flora dan fauna, karakteristik danau atau perairan laut; obyek buatan manusia seperti museum, katedral, masjid kuno, makam kuno, dan sebagainya; atau elemen dan peristiwa budaya seperti seni, adat istiadat, makanan, dll.

#### **b. Transportasi**

Perkembangan sistem transportasi memengaruhi arus wisatawan dan pertumbuhan industri akomodasi. Selain itu, kemajuan dalam teknologi transportasi juga memengaruhi fleksibilitas arah perjalanan. Jika angkutan kereta api bersifat linier dan tidak memiliki banyak cabang atau kelokan, arah perjalanan mobil dapat lebih bervariasi. Dengan cara yang

sama, pesawat terbang memiliki kemampuan untuk melalui berbagai hambatan alam dalam waktu yang lebih singkat.

### **c. Akomodasi**

Tempat menginap berbeda dari yang dirancang untuk umum (seperti hotel, motel, pondokan, atau tempat berkemah liburan) hingga yang dirancang secara pribadi untuk menerima tamu tertentu, seperti keluarga, kenalan, atau kelompok.

### **d. Fasilitas Pelayanan**

Seiring dengan pertumbuhan arus wisatawan, penyediaan fasilitas dan layanan semakin berkembang dan bervariasi. Pertokoan dan jasa pelayanan di tempat wisata dimulai dengan layanan kebutuhan sehari-hari, seperti toko makanan, minuman, atau jajanan, kemudian layanan perdagangan, seperti peramuniaga, tukang, atau layanan lain, kemudian layanan kenyamanan dan kesenangan, seperti toko pakaian, perabot rumah tangga, dll., lalu layanan keamanan dan keselamatan, seperti dokter, apotek, polisi, dan pemadam kebakaran. Pada akhirnya, pertokoan dan jasa pelayanan di tempat wisata berkembang.

### **e. Infrastruktur**

Fasilitas pendukung dan layanan pelayanan membutuhkan infrastruktur yang memadai. Selain mendukung pertumbuhan pariwisata, pembangunan infrastruktur juga secara tidak langsung memberi manfaat bagi penduduk setempat, yang dapat dimanfaatkan. Ini mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api, serta penyediaan saluran air minum, listrik, dan saluran pembuangan limbah.

#### **4. Dampak Sektor Pariwisata**

Sistem pariwisata dan komponennya berinteraksi dengan banyak hal, termasuk ekonomi, sosial, budaya, fisik (alam dan bangunan), teknologi, politik, dan lainnya. Menurut buku Pitana "Pengantar Ilmu Pariwisata", dampak ekonomi destinasi wisata dapat berasal dari penukaran mata uang asing, pendapatan pajak, sumber mata pencaharian, penyerapan tenaga kerja, efek multiplier, dan pemanfaatan fasilitas wisata. Menurut beberapa penelitian (lihat Diarta, 2007; George, 2004; McDonald, 2004; WTO, 1980; Lynn, 1994; McKean, 1977; Picard, 1996; Pitana, 2002, Shavit, 2003; Vickers, 1989 Degradasi kesenian, konflik sosial, solidaritas sosial, konsumerisme, dan peniruan adalah beberapa contoh dampak sosial budaya. Pengaruh terhadap lingkungan dan alam dapat mencakup penurunan kualitas lingkungan, pengambil-alihan lahan lindung atau konservasi untuk tujuan pariwisata, dan sebagainya.

##### **a. Dampak Ekonomi Pariwisata**

Menurut Cohen (1984) dalam Pitana (2009:185), ada delapan kategori utama efek pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap harga-harga
- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan control
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.
- 9) Dampak ekonomi yang timbul akibat pariwisata dapat bersifat positif maupun negatif.

Dampak Positif Pariwisata pada Ekonomi: Pariwisata memiliki banyak manfaat bagi ekonomi (Leiper, 1990) yang dikutip Pitana (2009:185-188):

- 1) Pendapatan dari penukaran valuta asing
- 2) Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri
- 3) Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata
- 4) Pendapatan pemerintah
- 5) Penyerapan tenaga kerja
- 6) Multiplier Effects
- 7) Pemanfaatan Fasilitas Pariwisata oleh Masyarakat Lokal.

Disamping dampak positif bagi perekonomian di atas, WTO (1980) dalam Pitana (2009:188-190) mengidentifikasi dampak positifnya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya permintaan akan produk pertanian local
- 2) Memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif
- 3) Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal bagi suatu daerah atau Negara
- 4) Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut
- 5) Mendorong pengembangan wilayah yang penciptaan kawasan ekonomi baru
- 6) Menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktiitas ekonomi
- 7) Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah
- 8) Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber revenue bagi otoritas lokal.

Selain dampak positif pariwisata terhadap ekonomi yang disebutkan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata juga memiliki dampak negatif bagi ekonomi suatu negara atau daerah tertentu. Namun, biasanya dampak negatifnya lebih kecil daripada dampak positifnya. Di antara dampak negatif tersebut adalah yang berikut (Mathieson dan Wall, 1982 dalam Leiper, 1990:233), yang diuraikan oleh Pitana (2009:191-192):

- 1) Ketergantungan terlalu besar kepada pariwisata
- 2) Meningkatkan angka inflansi dan meroketnya harga tanah
- 3) Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap
- 4) Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengendalian modal investasi juga tidak pasti waktunya
- 5) Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat.

Menurut WTO (1980) dalam Pitana (2009:192-193) dampak negatif pariwisata selain yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kelangkaan akan sumber makanan
- 2) Ketidakcocokan produk lokal dengan permintaan pasar pariwisata
- 3) Kelangkaan sumber energi dan bertambahnya biaya pengolahan limbah.

## **b. Dampak Sosial Budaya Pariwisata**

Secara teoritis, Cohen (1984) dalam Pitana (2009:194) mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata kedalam sepuluh kelompok besar, yaitu:

- 1) Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antar masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat all otonomi atau ketergantungannya.
- 2) Dampak terhadap hubungan interpersonal antar anggota masyarakat
- 3) Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/ kelembagaan sosial
- 4) Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata
- 5) Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat
- 6) Dampak terhadap pola pembagian kerja
- 7) Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas social
- 8) Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan
- 9) Dampak terhadap peningkatan penyimpangan-penyimpangan social
- 10) Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Sedangkan menurut Richarson dan Fluker (2004) dalam Pitana (2009:195-199) dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di daerah tujuan wisata antara lain adalah:

- 1) Dampak terhadap struktur populasi
- 2) Transpormasi struktur mata pencaharian
- 3) Transportasi tata nila
- 4) Dampak pada kehidupan sehari-hari.

### **c. Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan**

Lingkungan alam sangat penting untuk membuat suatu tempat menjadi tempat wisata atau tujuan yang tak terlupakan. Meskipun daerah tersebut bukan faktor utama atau satu-satunya yang menarik wisatawan, elemen alam dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wisatawan untuk memilihnya sebagai tujuan wisata. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata akan berdampak pada alam di suatu tempat.

Menurut Richardo dan Fluker (2004) dalam Pitana (2009:204), dampak pariwisata terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak dari penggunaan alat transportasi
- 2) Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata
- 3) Dampak dari pengoperasian industri pariwisata

Wisata adalah fenomena sosial yang sangat kompleks yang berkaitan dengan manusia secara keseluruhan dan memiliki banyak aspek penting, termasuk sosiologis, psikologis, ekonomis, dan ekologis, antara lain, tetapi yang paling banyak diperhatikan dan hampir hanya dianggap penting adalah aspek ekonomis. Oka, 1985:56) dalam Pitana (2009:209)

Sektor pariwisata hanya dapat berkembang jika masyarakat luas dapat memberikan pengaruh atau berpartisipasi secara aktif. Agar masyarakat luas dapat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pembangunan kepariwisataan, mereka harus memahami apa yang dimaksud dengan pariwisata serta keuntungan dan manfaatnya. Selain itu, masyarakat harus menyadari kerugian yang disebabkan oleh pariwisata.

Pembangunan sektor kepariwisataan harus ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber dan potensi kepariwisataan nasional dan lokal. Ini harus menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan yang dapat meningkatkan penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memberikan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. (Akhmad, 2003:87) Ketiga point diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

#### **d. Dampak Ekonomi**

- 1) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pemerintah
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.
- 3) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja.

- 4) Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

**e. Dampak Sosial**

- 1) Semakin Luasnya Lapangan Kerja
- 2) Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

**f. Dampak Kebudayaan**

- 1) Mendorong Pelestarian Budaya dan Peninggalan sejarah
- 2) Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu,

pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan Adikembangkan.

- 3) Mendorong Terpeliharanya Lingkungan Hidup
- 4) Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.
- 5) Wisatawan selalu Menikmati Segala Sesuatu yang Khas Dan Asli
- 6) Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

## **5. Daya Tarik Wisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berasal dari keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan atau lokasi wisata. Proses transformasi suatu lokasi menjadi daerah tujuan wisata (DTW) sangat bergantung pada tiga komponen utama, yang meliputi:

- a. Atraksi dapat dibedakan menjadi
  - 1) pertama, Tempat : umpunya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah.
  - 2) Kedua, Kejadian/Peristiwa : kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olah raga, festival dan sebagainya.

- b. Mudah Dicapai (Aksesibilitas)  
Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedianya transportasi ketempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman.
- c. Amenitas  
Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ketempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya.

Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan pengembangan suatu obyek wisata. Menurut Ahdinoto ada lima jenis komponen dalam pariwisata yaitu :

- 1) Atraksi wisata atraksi adalah daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumberdaya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.
- 2) Promosi dan pemasaran: Promosi adalah suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana agar atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah bagian penting.
- 3) Pasar wisata: (masyarakat pengirim wisata): pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum / tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motifasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

- 4) Transportasi: pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
- 5) Masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan). Komponen penting dalam pengembangan pariwisata menurut George McIntyre, adalah suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa suatu tempat wisata harus berisikan komponen tersebut untuk menjadi suatu objek wisata yang baik.

# **BAB IV**

## **PERAN AKTOR DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA**

---

### **A. Identifikasi Aktor**

Seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu disebut sebagai aktor. Menurut Hetifah (2003), stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi serta terlibat langsung atau tidak langsung dalam rencana atau program. Stakeholder dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, menurut Maryono et al (2005) (dalam Handayani, 2017):

1. Aktor Primer juga disebut sebagai Stakeholders primer, adalah pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam suatu rencana atau kegiatan dan terkena dampaknya secara langsung, baik positif maupun negatif. Aktor primer mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap suatu rencana dan harus berpartisipasi secara penuh dalam setiap fase prosesnya.
2. Aktor Kunci atau Stakeholders Kunci adalah Pemangku kepentingan yang memiliki hak resmi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang diatur oleh undang-undang atau lainnya.
3. Aktor Sekunder atau Stakeholders Sekunder adalah Pendukung pemangku kepentingan yang sangat penting dan berkontribusi pada keberhasilan kegiatan atau

proses pengembangan, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana. Stakeholder sekunder biasanya membantu atau memfasilitasi aktor lain dalam menjalankan rencana kegiatan dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Contoh Stakeholders sekunder termasuk perusahaan swasta, peneliti, media, dan lainnya.

## **B. Teori Peran**

Teori peran melibatkan banyak teori, orientasi, dan disiplin ilmu yang berbeda. Dunia teater adalah tempat "peran" berasal. Aktor teater harus berperan sebagai karakter dan diharapkan berperilaku dengan cara tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)." Seseorang menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Selain itu, peran atau peran juga terdiri dari beberapa bagian, seperti:

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflic* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Peran, atau peran, adalah sekumpulan harapan yang ditujukan kepada orang yang memegang posisi tertentu. Menurut teori peranan, jika ada dua tekanan atau lebih yang ditujukan kepada seseorang secara bersamaan, seseorang akan mengalami konflik peran dan akan sulit atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.

Menurut teori peran, interaksi sosial yang dilakukan oleh individu di suatu lingkungan yang didasarkan pada kebudayaan mereka digambarkan. Menurut teori peran, orang yang menghadapi banyak konflik dan ambiguitas peran akan mengalami kecemasan, menjadi kurang puas, dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif. Jika seseorang mengalami dua tekanan atau lebih secara bersamaan, dia akan mengalami konflik dalam dirinya. Setiap orang mengalami konflik karena harus menjalankan dua peran yang berbeda pada waktu yang sama.

Salah satu aspek paling penting dari perilaku sosial adalah teori peran, yang menyatakan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi berdasarkan identitas sosial masing-masing dan situasi. Teori ini mulai berfungsi sebagai metafora teatrikal, seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran. Teori peran dapat dikatakan

berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan. Dalam hal ini, tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa dalam konteks lain, perilaku sosial juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial.

Menurut Suekamto (2009:8) dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia", istilah "peran" berarti "pemain sandiwara", yaitu jenis tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berada di posisi tertentu di masyarakat. Pengertian peran berarti bahwa seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ada perbedaan antara kedudukan dan peran. Karena satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Beberapa dimensi peran adalah:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

### **C. Peran Aktor dalam Pariwisata**

Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) mengatakan bahwa 37 peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan dapat dibagi menjadi lima indikator:

1. Policy creator adalah individu atau sekelompok individu yang memegang tanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan kebijakan di dalam suatu organisasi, instansi pemerintah, atau entitas terkait.
2. Koordinator adalah posisi dalam suatu kelompok yang memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kerja sama yang efektif serta komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
3. Fasilitator adalah individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mempermudah atau memfasilitasi proses dalam kelompok atau pertemuan dengan tujuan mencapai suatu tujuan bersama.
4. Implementer adalah individu, sekelompok orang, atau entitas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan, program, atau proyek.
5. Akselerator adalah suatu alat atau sistem yang dipergunakan untuk mempercepat atau meningkatkan kecepatan atau kinerja suatu objek atau proses.

Menurut Bryson dalam Hardiansyah (2012:190), analisis aktor dimulai dengan menyusun para pihak pada matriks dua kali dua berdasarkan minat (interest) aktor terhadap suatu kebijakan dan kekuatan (power) aktor untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Interest adalah minat atau kepentingan aktor terhadap pengambilan keputusan, sedangkan kekuatan adalah kekuatan aktor untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan atau peraturan untuk mendukung keputusan yang telah dibuat. Aktor dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan pengaruh (influence) dan kepentingan (interest) yang dimiliki setiap aktor (Reed, 2009):

1. Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (influence) yang rendah diklasifikasikan sebagai subyek (Subjects). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan Aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan Aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
2. Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci (Key Player). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk evaluasi kebijakan baru..
3. Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) yang rendah diklasifikasikan sebagai Pengikut Lain (Crowd). Diperlukan sedikit pertimbangan untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena pada kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu.

4. Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (influence) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pendukung (Context setters). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi key player karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan Aktor ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.

#### **D. Peran Pemerintah dalam Pariwisata**

Pemerintah yang siap didefinisikan sebagai pemerintah yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip ini tumbuh dari penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang melibatkan baik birokrasi intern maupun ekstern (Syaukani, 2001:121). Keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisien, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat adalah tanda-tanda pemerintah yang mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah yang siap seharusnya melakukan lima fungsi pemerintahan utama, yang termasuk:

Pertama, fungsi pemerintahan sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya; kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan peraturan; ketiga, fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi; dan keempat, fungsi perwakilan, yaitu fungsi untuk mewakili masyarakat di luar wilayah mereka; dan kelima, fungsi

koordinasi, yaitu fungsi yang berkaitan Pendit (1994) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki dua fungsi penting dalam industri pariwisata. Pertama, mereka menjalankan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pembangunan pariwisata. Kedua, mereka menjalankan dan bertanggung jawab atas upaya pengembangan potensi pariwisata yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tingkat atas sesuai dengan tugas bantuan. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menjaga keamanan, menetapkan aturan main, dan memberikan dukungan keuangan yang sangat penting bagi industri pariwisata. Pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan pariwisata melalui penyediaan layanan dan pengawasan industri tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan wisata yang ditawarkan memenuhi standar dan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Elliot, 1997) dalam Siagian (2011:120).

Pemerintah negara sebenarnya berfungsi untuk mengatur dan melayani, menurut Siagian (2011:128). Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan sifat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan sifat negara sebagai suatu negara kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah adalah untuk mengatur dan mengelola masyarakat suatu negara untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kesejahteraan.

Pitana dan Gayatri (2009:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor,

masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Peuda dan Olahraga Kabupaten Katingan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisor, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Karena fungsi dan tanggung jawab orientasi pariwisata pada umumnya adalah sebagai berikut: Menurut Yoeti (2001) dalam Wahab (2015:203), organisasi yang diberi wewenang untuk mengembangkan pariwisata di wilayahnya harus dapat menerapkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya:

- a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- b. Melakukan kordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga instansi dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.

- c. Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasar di waktu-waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- f. Merumuskan kebijakan tentang perkembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara teratur dan berencana.

Menurut Burkard dan Medik dalam Oka A. Yoeti (2001: 188) dalam Wahab (2015:206), organisasi pariwisata dapat melakukan hal-hal berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di saerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata di daerah itu.
- b. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari bermacam-macam segmen pasar.
- d. Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik.

Sangat ideal bagi organisasi pariwisata lokal untuk membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA), yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan dan perencanaan strategis pemasaran daerah sebagai tujuan wisata yang mengundang lebih banyak wisatawan.

Karena fungsi dan tanggung jawab organisasi pariwisata pada umumnya adalah sebagai berikut: Menurut Oka A. Yoeti (2001: 48), organisasi yang diberi wewenang untuk mengembangkan pariwisata di wilayahnya harus dapat menerapkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya:

- a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- c. Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki prospek wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana.

Hasilnya adalah bahwa pemerintah tidak hanya harus menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus bekerja sama dalam birokrasi internal dan eksternal untuk menerapkannya. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, mengutamakan elemen seperti keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi publik. Selain itu, dalam posisi mereka sebagai penyedia layanan, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatur, membangun, mewakili, dan merencanakan. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat komitmen dalam menjalankan tugasnya. Posisi penting dan penting bagi pemerintah mengharuskan kolaborasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Secara garis besar, tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga adalah mengelola sektor pariwisata di suatu daerah, terutama memberdayakan masyarakat untuk bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata lokal.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Menurut Ruhanen (2013:92), pemerintah daerah masih memiliki posisi terbaik untuk mendorong program pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pemerintah pusat. Sangat sulit untuk mempertimbangkan berbagai studi kasus dalam hal meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Mengingat bahwa ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat mengembangkan industri pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata adalah peran pemangku kepentingan (stakeholders). Pemerintah adalah pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam memajukan pengembangan sektor pariwisata karena pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam pengembangan

sektor pariwisata. Adapun peran pemerintah daerah dalam memperkuat peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata, menurut (Subadra, 2006) yang dikutip dalam (Afandi, Sunarti, & Hakim, 2017) yaitu:

### **1. Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata**

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang mencakup pengambilan keputusan atau keputusan tentang berbagai cara untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan (Conyers & Hills, 1984). Perencanaan pembangunan sangat penting karena akan meningkatkan citra, potensi, dan daya saing suatu daerah. Karena itu, untuk menjadi efektif, perencanaan pembangunan harus memiliki sistem. Dalam sektor pariwisata, perencanaan pembangunan merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengambil peran penting dan strategis karena pemerintah adalah pengambil keputusan dan diharapkan peningkatan aksesibilitas dan sarana. Dalam merencanakan pertumbuhan pariwisata oleh pemerintah, hal-hal berikut menjadi fokus:

- a. Peningkatan Daya Tarik Wisata
- b. Penyediaan Fasilitas Rumah Makan
- c. Peningkatan Aksesibilitas
- d. Promosi Wisata.

### **2. Kebijakan dan Peraturan Pariwisata**

Kebijakan adalah produk yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan legitimasi atau ketetapan dan ketentuan terhadap suatu hal yang diperdebatkan atau akan dibahas. Pemerintah harus menggunakan kebijakan pariwisata sebagai strategi kedua untuk meningkatkan sektor ini. Karena kebijakan dalam sektor pariwisata berfungsi untuk melindungi dan mengembangkan sektor ini, regulasi yang

berasal dari kebijakan harus diperkuat dan diperjelas agar tidak tumpang tindih. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa regulasi pariwisata harus mampu memfasilitasi investor dan wisatawan untuk berinvestasi. Pembangunan sektor pariwisata sangat penting bagi pemerintah karena mereka adalah pihak yang memiliki peranan paling besar terhadap kemajuan sektor tersebut, yang berdampak pada pendapatan lokal. Jepang adalah salah satu negara dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Selanjutnya (Rosliana 2017) menyatakan bahwa Jepang adalah negara asia yang maju dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Setelah ekonominya turun pada tahun 1990-an, Jepang kemudian bangkit dengan membenahi beberapa sektor ekonominya. Saat itu, industri, perbankan, transportasi, dan telekomunikasi menjadi fokus pembenahan ekonomi. Baru pada tahun 2007 Pemerintah Jepang mulai fokus terhadap pengembangan sektor pariwisata sebagai strategi dalam penguatan perekonomian.

Pemerintah Jepang meluncurkan program tour "Muslim Friendly" pada tahun 2015 untuk meningkatkan sektor pariwisata. Strategi lain yang digunakan pemerintah adalah:

- a. Penggunaan Website Wisata Berbahasa Asing;
- b. Menyediakan Tujuan Wisata; dan
- c. Kemudahan Perjalanan Wisata.

Berdasarkan strategi pemerintah Jepang untuk mengembangkan dan mengelola sektor pariwisatanya, Indonesia harus memperkuat layanan wisata dan teknologi informasi dan komunikasi. Ini karena kedua strategi ini memungkinkan Jepang untuk mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor pariwisatanya.

## **E. Peran Masyarakat dalam Pariwisata**

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: (1) interaksi antar warga-warganya, (2) adat istiadat, (3) kontinuitas waktu, dan (4) rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009). Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2006) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk yang cukup lama sehingga menciptakan suatu adat istiadat, menurut Linton dalam Soekano (2006) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan masyarakat menurut Soemarjan (dalam Soekanto, 2006) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. (Dalam Murianto. 2014:187)

Dalam konteks pengembangan pariwisata, masyarakat yang siap adalah masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap manfaat atas kehadiran wisatawan (*perceived benefit*) dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pariwisata. Kedua hal tersebut nantinya akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap wisatawan. Persepsi merupakan cara pandang, tindakan, dan gambaran yang diberikan seseorang terhadap sesuatu yang berada disekitar lingkungannya, baik persepsi yang diberikan positif atau negatif (Murianto, 2014). Kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan pariwisata juga dapat terlihat dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan adalah bagaimana pendelegasian sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memberikan keputusan yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapi atau pelaksanaan suatu program (Webster dalam Luthfan, 2012). Pemberdayaan diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kewenangan dengan menggunakan apa yang dimiliki baik untuk tujuan pribadi maupun secara masyarakat (Oxford English Dictionary dalam Luthfan, 2012). Menurut Rachmawan (2012), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut Pitana dan Gayatri (2005) yaitu masyarakat umum yang tinggal di sekitar obyek wisata, yang juga merupakan pemilik sah dari berbagai sumberdaya modal pariwisata, seperti kebudayaan, tokoh masyarakat, intelektual, LSM serta media massa.

Pengembangan sektor pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta pihak lain, manfaat yang optimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhannya selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lain. Maka dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung tercapainya satu hasil yang optimal tersebut. Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih menitik beratkan pada peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata, tidak lain adalah usaha membuka akses atau kekuasaan, sumber daya dan kerjasama dengan pemerintah serta pihak swasta. Peran serta masyarakat dapat terwujud karena manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu melalui terbukanya kesempatan kerja dari usaha jasa wisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka. Maka dengan demikian diharapkan situasi tersebut akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan didalamnya, baik secara aktif maupun secara pasif. Peran aktif dilaksanakan secara langsung baik dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama. Peran ini secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dengan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan pariwisata melalui pembinaan rasa ikut memiliki di kalangan masyarakat. Peran pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam serta masyarakat cenderung sekedar melaksanakan perintah dan mendukung terpeliharanya sumber daya alam. Kesimpulan yang dihasilkan adalah peran masyarakat yang sangat penting dalam pengembangan

pariwisata ini adalah memiliki inisiatif dan kreasi yang dapat mendorong pemerintah untuk berusaha mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki. Namun, secara detailnya ini lebih pengembangan pariwisata mengedepankan untuk mengelola interaksi antar warga yang dapat menjadi modal utama masyarakat itu sendiri, mengangkat adat istiadat yang dimiliki atau kearifan lokal yang menjadi acuan hidup, pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan untuk membuka akses keterlibatan dalam pengembangan pariwisata dengan pemerintah dan dalam mengakses sumber daya.

## **F. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Aktor dalam Pariwisata**

Peran aktor dalam pengembangan pariwisata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor (Destiana, Rizka, 2020):

### **1. Faktor Pendorong**

- a. Nilai adalah keuntungan atau kepentingan yang dimiliki oleh individu tau kelompok yang terlibat atau terkait dengan suatu organisasi, proyek, atau entitas tertentu.
- b. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu, kelompok, atau entitas dengan menggunakan metode seperti kata – kata, suara, gambar, tulisan, atau gestur.

### **2. Faktor Penghambat**

- a. Kepercayaan adalah istilah kompleks yang mencakup keyakinan, pandangan, dan sikap individu terhadap orang lain atau situasi tertentu

karena memiliki nilai moral dan etika yang positif dan dianggap baik.

- b. Kebijakan adalah seperangkat tindakan, aturan, atau petunjuk yang disusun untuk memberikan panduan dan arahan dalam mengatur suatu tindakan atau pengambilan keputusan di dalam suatu entitas.

# **BAB**

# **V**

## **PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH BERBASIS LOCAL WISDOM**

---

### **A. Pengembangan Desa Wisata di Kalimantan Tengah**

Salah satu jenis wisata pedesaan adalah desa wisata. Desa wisata adalah perjalanan yang bertujuan untuk menikmati suasana kehidupan pedesaan, menghormati budaya dan tradisi masyarakat setempat, memperoleh nilai tambah hidup dari lingkungan alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungannya adalah atraksi wisata. Desa wisata dapat terdiri dari alam seperti gunung, persawahan, hutan, tebing, bentang alam, flora dan fauna, serta taman laut; budaya seperti peninggalan sejarah, adat istiadat, tradisi, kehidupan sehari-hari, dan karya arsitektur; atau saujana, yaitu karya budaya (benda) yang "menyatu" dengan bentang alam.

Karena itu, kriteria dasar pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut: a) keberadaan obyek dan daya tarik: desa memiliki obyek daerah tujuan wisata dan memiliki daya tarik, paling sedikit berdekatan dengan obyek daerah tujuan wisata yang sudah terkenal sehingga dapat dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada; b) memiliki akses fisik dan pasar; c) potensi kemitraan; d) semangat dan dorongan masyarakat; dan e) tersedianya fasilitas umum minimal.

Selain itu, pengembangan wisata pedesaan harus mengikuti prinsip perencanaan berikut: a) mempertimbangkan karakteristik lingkungan setempat, b) mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan pariwisata di desa tersebut, c) materi yang digunakan sesuai dengan lingkungan setempat, d) bahan-bahan operasional yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang atau hasil daur ulang, serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan karena wilayah tersebut sangat luas.

Dalam pengembangan desa wisata sebagai obyek wisata, penting untuk memahami bahwa masyarakat setempat adalah subjek aktif dan bukan pasif. Sebuah lingkungan perdesaan dapat dianggap sebagai tempat wisata sekaligus obyek. Sebagai obyek, desa adalah tujuan pariwisata, dan sebagai subyek, apa yang dihasilkan desa akan dinikmati langsung oleh masyarakatnya. Peran aktif masyarakat sangat penting untuk kelangsungan hidup desa (Raharjana, 2005). Pengembangan desa wisata dapat menguntungkan, diantaranya adalah adanya lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut, selain itu desa wisata yang mengusung konsep ekowisata membuat suatu desa dapat mempertahankan kelestarian alam dan budaya desa tersebut. Selain itu, desa wisata dapat menjadikan suatu desa menjadi desa yang mandiri karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki oleh masyarakat setempat.

Pengembangan potensi masyarakat pedesaan yang didasarkan pada pengembangan potensi alam, pertanian, sosial, dan budaya lokal dapat berbeda dari pengembangan potensi masyarakat yang didasarkan pada agrowisata. Dalam hal ini, peran dan partisipasi masyarakat pedesaan dapat dimasukkan dalam pengembangan agrowisata (Rorah, 2012).

Pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya sejalan dengan hal ini. Dalam pengembangan desa wisata, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana masyarakat dapat didorong dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga potensi desa dan masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Dengan menggali potensi desa dan masyarakat secara konsisten, pengembangan desa wisata dapat berdampak maksimal pada kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Dengan demikian, pengembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari pengembangan dan penggalian potensi wisata itu sendiri, mulai dari tingkat daerah atau yang paling rendah (Aditya, 2018:20).

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pembinaan secara sinergis antara pemerintah dan pariwisata. Pembinaan ini akan memungkinkan para pelaku usaha pariwisata untuk merencanakan, menyusun, dan memprogramkan desa wisata berdasarkan kemampuan masyarakat dan potensi desa. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang terdiri dari 1.569 desa yang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Potensi ini bisa dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pariwisata tidak dapat lepas dari budaya atau kehidupan masyarakat, jadi akan ada interaksi budaya antara wisatawan dan masyarakat setempat. Jika seorang wisatawan berkunjung ke daerah wisata yang memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari kehidupannya, mereka akan mengalami pembelajaran budaya. Mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kebudayaan yang mereka miliki.

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), sebuah destinasi wisata berskala internasional. TNTP pertama kali didirikan sebagai Suaka Margasatwa Tanjung Puting, yang merupakan gabungan dari Cagar Alam Sampit dan Suaka Margasatwa Kotawaringin. Dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1936/1937 dan memiliki luas 205.000 ha untuk melindungi Orangutan (*Pongo pygmeus*) dan Bekantan (*Nasalis Larvatus*). TNTP ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 12 Mei 1984 dengan SK Kementerian Kehutanan nomor 096/kpts11/84. Selain itu, pada 11 Desember 1984, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam mengeluarkan surat keputusan nomor 45/kpts/VI-sek/84. Wilayah kerja TNTP terdiri dari suaka margasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan 300.040 ha. Karena keunikan ini, banyak wisatawan dari luar negeri mengunjunginya.

Terdapat beberapa objek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut data dari Dinas Pariwisata (2016):

1. Wisata alam: Taman Nasional Tanjung Puting; Orangutan Care Center Quarantie (OCCQ); Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang; Pantai Bogam; Pantai Keraya; Pantai Sabuai; Susur Sungai Arut; Pantai Tanjung Harapan; Taman Laut Senggora; Danau Gatal; dan Danau Masaurayan.
2. Wisata sejarah dan budaya: Istana Kuning, Istana Alnursari, Istana Mangkubumi, Masjid dan Makam Kyai Gede, dan Monument Palagan Samba.
3. Wisata desa adat: Desa Adat Pasir Panjang, Desa Adat Pandau, Riam dan Panahan, Desa Adat Darat.

4. Agrowisata: Sawah Penati SP-1, Sawah Desa Barabai, Sulung Rach, dan Kebun Durian Montong.

Selain tempat wisata di atas, Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki Desa Wisata Kopi di desa Kumpai Batu Atas. Desa Wisata Kopi dikembangkan sejak Oktober 2017 oleh Kelompok Sadar Wisata dan Komunitas Lokal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brian L Djumaty dan Nina Putri Hayam Dey pada awal tahun 2018, ditemukan bahwa para petani mengalami kesulitan dan tantangan sebelum turis mulai datang ke desa. Harga kopi telah naik dari waktu ke waktu sejak tanaman kopi di Desa Kumpai Batu Atas dibangun kembali. Harganya dulu 25 ribu rupiah per kilo, tetapi sekarang 40 hingga 60 ribu rupiah per kilo.

Untuk menciptakan wisata di Desa Kumpai Batu Atas, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa tersebut telah bekerja sama dengan beberapa komunitas stakeholder di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani kopi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Petani menghasilkan kopi Liberika dan Robusta. Desa wisata kopi ini dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia

Selain desa di kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin timur juga memiliki potensi pengembangan desa wisata. Kabupaten Kotawaringin Timur berada di lokasi yang strategis sebagai pintu masuk ke Kalimantan Tengah.

Dengan potensi wisata yang luar biasa, sektor pariwisata kabupaten memiliki potensi besar untuk berkembang. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki banyak objek wisata, termasuk alam, buatan, sekolah,

agama, dan budaya. Wisata yang beragam di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjadi peluang investasi dan potensi ekonomi yang besar bagi pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal. Untuk menjamin kesinambungan antarstakeholder secara konsisten, dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat.

Desa Ujung Pandaran merupakan salah satu daerah pesisir di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terletak di Kecamatan Teluk Sampit. Secara geografis, Desa Ujung Pandaran adalah lokasi strategis karena memiliki banyak sumber daya pariwisata yang terkait dengan seluruh sumber daya pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/104/HUK-DISBUDPAR/VI/2014 menetapkan Desa Ujung Pandaran sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur karena potensi wisatanya yang luar biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Prakoso (2008) dalam Untari (2018), desa ini layak disebut sebagai desa wisata karena memiliki: atraksi unggulan yang unik atau tidak ditemukan di tempat lain, seperti Pantai Ujung Pandaran; atraksi alami yang belum pernah terpengaruh oleh campur tangan manusia, seperti wisata budaya ritual adat Simah Laut; dan keunikan, yaitu atraksi yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan atraksi lain.

Pariwisata dan kebudayaan di Palangka Raya juga memiliki arti yang sangat penting dan strategis karena merupakan salah satu bidang yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kota melalui usaha ekonomi multisektor dan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekonomi kota.

Pariwisata Palangka Raya memiliki banyak potensi wisata yang unik dan beragam, dimulai dari kekayaan hutan, sungai, budaya, dan lokasi dengan berbagai daya tarik alam. Desa Wisata Sei Gohong adalah sebuah desa yang memiliki nilai budaya karena memiliki pemandangan alam yang indah, udara segar, dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih hidup.

Desa Wisata Sei Gohong adalah salah satu tujuan wisata populer di kota Palangka Raya. Bahkan pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, ada sekitar 40 hingga 50 wisatawan yang berkunjung ke desa setiap hari. Banyak orang memilih desa sebagai tempat rekreasi untuk menikmati suasana alamnya, karena desa ini dekat dengan pusat kota dan mudah diakses dengan mobil. Selain suasananya yang khas pedesaan, ada Wisata Sungai Batu, Dermaga Teluk Kaja, Penginapan Bougen Ville, dan aset budaya yang masih ada. Wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal suku Dayak akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu, Betang, dan Sandung, yang merupakan bangunan keramat yang memiliki nilai historis tinggi dan sangat dihormati oleh masyarakat.

Di kabupaten Sukamara, adapula desa wisata kampoeng wisata Soengai Taboek yang terletak di desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Luci. Ini adalah upaya nyata dari pemerintah Kabupaten Sukamara untuk meningkatkan pariwisata lokal, nasional, dan internasional di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Ini juga merupakan cara untuk mendapatkan PAD dan memenuhi kebutuhan rekreasi, prestasi, dan kebanggaan masyarakat Desa Sungai Tabuk.

Ada beberapa sumber-sumber daya yang dipertimbangkan sehingga desa tersebut menjadi desa wisata. Dari sumber daya alamnya terdapat Pantai, yaitu Pantai Anugrah yang terletak di RT.01, kemudian ada Lahan Kebun Kelapa yang dapat dijadikan Camping Ground dan Outbond, kemudian panorama Pantai dan dermaga perahu. Ada pula sumber daya manusia yang bisa dikembangkan melalui pelatihan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan penyuluhan sadar wisata, kegiatan penyuluhan kewirausahaan, kegiatan penyuluhan dan keterampilan ibu-ibu dan kegiatan nelayan.

Desa Riam Tinggi di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau mendapat penghargaan dari Program Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021 karena keindahan alamnya. Salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Desa Riam Tinggi. Desa ini hanya 14 km dari Kecamatan Delang dan 172 km dari Nanga Bulik, ibu kota Kabupaten Lamandau. Desa Riam Tinggi didirikan pada tahun 1917 dan mencakup 1.000 ha, dengan lebih dari 50% dari area tersebut merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Desa Riam Tinggi berkembang menjadi sebuah Desa Wisata dengan masyarakat yang ramah sejak SK Bupati Lamandau Nomor 188.45/1521II/HUK/2015 menetapkan Kecamatan Delang sebagai tujuan wisata alam dan budaya. Saat ini, Desa Riam Tinggi menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Lamandau karena keindahan alam, sejarah, dan adat istiadat. Desa Riam Tinggi dan Desa Benakitan dari Kecamatan Batang Kawa menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 atas prestasinya dalam berbagai kriteria.

Desa Riam Tinggi memiliki banyak daya tarik wisata, seperti Bukit Lubang Kilat, arung jeram Sungai Riam Tinggi, trekking ke ladang warga, kebudayaan Ponjorahan (tradisi sambut tamu), kebudayaan Babantan Laman, kebudayaan Banaik Banaki (tradisi sambut tamu), Bagondang (pesta sambut tamu), kebudayaan Tota Garung Pantan, kebudayaan Babukung, dan wisata edukasi seperti menganyam, menyempit, dan agrowisata. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau, 2021 dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022)

Salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah adalah Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan memiliki banyak potensi wisata, termasuk wisata alam, budaya, dan kreatif. Pemerintah Daerah sedang mengembangkan wisata ini agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Menurut data yang diolah dan dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan, total wisatawan yang datang ke Kabupaten Barito Selatan adalah 30.273 dari tahun 2019 hingga juni 2022. Selama beberapa tahun terakhir, ada peningkatan jumlah pengunjung, meskipun pada tahun 2020–2021 ada penurunan jumlah pengunjung.

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/246/2021 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Barito Selatan memungkinkan pemerintahan Kabupaten Barito Selatan untuk merencanakan dan menerapkan pengembangan Desa Wisata. Sejak tahun 2021, ada tiga Desa Wisata di Kabupaten Barito Selatan. Mereka adalah Desa Sanggu di Kecamatan Dusun Selatan, Desa Kalahien di Kecamatan Dusun Selatan, dan Desa Bintang Ara di Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Desa Kalahien di Kecamatan Dusun Selatan, Desa Bintang Ara di Kecamatan Gunung Bintang Awai, dan Desa Sanggu di Kecamatan Dusun Selatan adalah Desa Wisata di Kabupaten Barito Selatan. Desa-desa ini memiliki banyak potensi dan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Desa-desa ini ditetapkan sebagai Desa Wisata karena memiliki potensi budaya, wisata alam, dan wisata buatan yang menarik bagi masyarakat untuk dikunjungi.

Di Kabupaten Seruyan, terdapat desa wisata yang terletak di Desa Sungai Bakau. Salah satu tempat wisata baru di Kabupaten Seruyan, Desa Wisata Sungai Bakau, membutuhkan perawatan khusus agar dapat beroperasi dengan baik dan menarik wisatawan domestik dan asing. Wisata Desa Sungai Bakau juga terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlah pengunjung menurun dalam satu tahun terakhir, menurut data pengelola.

Jika wisata Desa Sungai Bakau ingin terus berkembang, semua pihak harus berkomitmen untuk mengelolanya. Semua pemangku kebijakan harus bekerja sama untuk membangun tempat wisata (Devy & Soemanto, 2017). Tidak diragukan lagi, pengelolaan tempat wisata harus dilakukan dengan terencana dan termanajemen dengan baik. Untuk meningkatkan branding destinasi wisata, media harus digunakan.

Desa wisata yang menarik, Pemancingan Lawang Kajang, menjadi tujuan utama bagi para pelancong domestik. Daya tarik utama Pemancingan Lawang Kajang adalah keberadaan tempat wisata yang tenang. Desa ini terletak di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ini adalah ekowisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan fokus pada

pengembangan potensi alam. Daya tarik destinasi terutama terletak pada keindahan alam di sepanjang sungai Kapuas dan produk olahan ikan asin sebagai oleh-oleh. Kecantikan alam desa adalah daya tarik utama wisatawan. Destinasi Pemancingan Lawang Kajang menarik turis lokal karena banyak lokasi yang bagus untuk foto Instagram, terutama saat matahari terbenam dan air pasang.

Salah satu desa di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Desa Bukit Bamba. Desa ini terletak di jalan poros lintas trans di kecamatan Kahayan Tengah, kabupaten Pulang Pisau. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia adalah Kahayan Tengah. Desa Bukit Bamba, dengan luas 3.968,9 ha, adalah salah satu dari 14 desa di Kecamatan Kahayan Tengah. Sebagai salah satu dari 14 desa tersebut, Bukit Bamba memiliki batas wilayah langsung dengan semua desa lainnya. Desa Bukit Bamba berbatasan dengan beberapa desa. Desa Tahawa berbatasan dengan desa Bukit Bamba di sebelah utara, desa Balukon Baru berbatasan dengan desa di sebelah selatan, Kabupaten Kapuas berbatasan dengan desa di sebelah timur, dan Kota Madya Palangka Raya berbatasan dengan desa di sebelah barat. Topografi Desa Bukit Bamba adalah dataran tinggi dan tropis, dengan hampir sebagian besar desanya berpasir. Desa Bukit Bamba memiliki banyak tanah berpasir. Infrastruktur Desa Bukit Bamba terbilang maju dibandingkan dengan Desa lain di Kecamatan Kahayan Tengah karena infrastruktur utama seperti jalan raya, jalan desa, jaringan listrik, sumber air bersih, posyandu, dan poskesdes sudah tersedia untuk semua warga Desa. Desa Bukit Bamba juga memiliki Kantor Desa, Balai Desa, dan 1 Taman Kanak-kanak (TK).

Wisata desa Bukit Bamba adalah penerapannya dari gagasan desa wisata. Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2011) dan Sunarjaya et al. (2018), desa wisata adalah kombinasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan adat dan norma. Setiap desa wisata memiliki daya tarik yang unik, yang dapat berupa kehidupan sosial budaya masyarakatnya atau keunikan lingkungan alam perdesaan. Daya tarik ini dikemas secara alami dan menarik sehingga menarik wisatawan.

Beberapa desa wisata di atas merupakan desa-desa wisata yang perlu dikembangkan lebih baik lagi sehingga dapat berdampak baik untuk masyarakat desa maupun untuk kemajuan desa di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Desa-desa wisata mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan beberapa jurnal yang ditemukan.

Menurut I. Pitana (2009), pembangunan dan pengembangan pariwisata akan menyentuh dan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga memiliki dampak yang beragam terhadap masyarakat setempat, yang dapat berdampak baik atau buruk. Meskipun pengembangan pariwisata memiliki banyak manfaat ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagi masyarakat, seringkali pengembangan yang tidak tepat justru membawa banyak kerugian bagi masyarakat lokal itu sendiri. Adanya berbagai manfaat dan tantangan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata seperti mengelola api; pengelola dapat menggunakannya untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik.

Pada Jurnal yang ditulis oleh Nunun Nurhajati dalam judul “Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)” Menjelaskan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mulyosari berdampak positif pada pendapatan masyarakat karena meningkatkan pendapatan untuk berbagai pekerja, seperti pedagang dan penyedia layanan pariwisata. Selain itu, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mulyosari membuka banyak peluang baru bagi masyarakat untuk mendapatkan uang selain dari pertanian. Namun, dampak tidak langsung adalah peningkatan harga tanah, yang merupakan investasi masyarakat.

Industri pariwisata membantu masyarakat mendapatkan uang, yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan daya beli, yang menghasilkan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bahkan mengubah fokus masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih dari hanya kebutuhan primer dan sekunder.

Menurut sumber, pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mulyosari belum menyebabkan kenaikan harga. Mereka mengatakan bahwa perekonomian masyarakat lokal tidak terpengaruh oleh peningkatan harga karena kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung pariwisata masih dapat dipenuhi oleh industri dan pertanian lokal.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mulyosari telah meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran di masyarakat Desa Mulyosari. Pembangunan industri pariwisata menciptakan banyak kesempatan kerja karena industri ini sangat kompleks dan memungkinkan banyak usaha untuk memenuhi permintaan pariwisata.

Secara otomatis, penciptaan lapangan kerja baru akan mengurangi pengangguran di Desa Wisata Mulyosari.

Dalam jurnal yang ditulis oleh I Gusti Bagus Yogi Sutanegara Bagiana dan I Nyoman Mahendra Yasa dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Panglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli” menyebutkan Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui peluang bagi masyarakat untuk mendirikan bisnis di sektor pariwisata, seperti bisnis kerajinan, toko, dan lainnya. Usaha-usaha ini dapat menjadi pekerjaan utama maupun sampingan, menambah jumlah jam kerja masyarakat di Desa Penglipuran. Semakin banyak wisatawan yang datang ke Desa Penglipuran, semakin banyak peluang bisnis yang akan muncul dan menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Studi ini sejalan dengan yang dilakukan Maulana (2016).

Ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penglipuran dengan memberikan peluang pekerjaan yang akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Peluang usaha terkait budaya Desa Penglipuran, seperti kerajinan bambu, pengrajin loloh cem-cem, dan membuka warung, adalah beberapa contoh usaha yang dapat menguntungkan masyarakat.

Dari dua jurnal di atas dapat diketahui bahwa pengembangan desa wisata memiliki pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata di Kalimantan Tengah apabila dapat terkelola dengan baik akan mendatangkan banyak wisatawan yang dapat menambah penghasilan desa tersebut.

## **B. Integrasi Wisata di Kalimantan Tengah**

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah kini mulai mengembangkan potensi pariwisata daerahnya masing-masing. Dengan demikian, UU No. 10 Tahun 2009 mendukung upaya untuk mengembangkan industri pariwisata di seluruh negara, yang menetapkan bahwa keberadaan objek wisata di suatu daerah akan memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta lingkungan, dan melestarikan budaya dan alam setempat. Pariwisata mulai berkembang seiring dengan minat dan motivasi pengunjung.

Sosiologi menganggap integrasi sebagai jenis hubungan (ikatan) khusus yang menghubungkan sekelompok orang, organisasi, atau peristiwa (Mitchell, 1969). Setiap kelompok yang didefinisikan di dalam integrasi disebut sebagai simpul. Oleh karena itu, sebuah integrasi terdiri dari banyak simpul yang saling terhubung dalam ikatan tertentu.

Seberapa kuat simpul pusat dapat mempengaruhi simpul lain dalam integrasi dipengaruhi oleh lokasinya. Namun, kepadatan atau ketebalan integrasi menunjukkan banyaknya ikatan (hubungan) yang menghubungkan semua titik integrasi. Centralitas simpul sangat mudah berubah, yang pada akhirnya akan mengubah struktur pola integrasi secara keseluruhan, karena integrasi merupakan sekumpulan hubungan antar simpul yang terus berubah.

Dalam hal pariwisata, pola integrasi adalah sekumpulan ikatan yang menghubungkan berbagai komponen pariwisata sebagai simpul integrasi. Pola ini berkembang seiring dengan perkembangan sektor ini karena

banyaknya komponen yang terkait. Oleh karena itu, bentuk pola integrasi pariwisata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada kerapatan dan jumlah komponen yang terkait.

Desa wisata adalah daerah perdesaan yang memiliki beberapa fitur yang membuatnya menjadi tempat wisata. Orang-orang di daerah ini tetap menjalankan kebiasaan dan budaya asli mereka. Selain itu, sebuah desa wisata memiliki potensi lokal pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial. Desa wisata yang berdaya saing bergantung pada ekonomi kreatif.

Konsep pariwisata memiliki banyak aspek dan banyak definisi. Pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat tujuan di luar lingkungan biasa. Wisata ini berlangsung tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk alasan bisnis, rekreasi, atau lainnya. Pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata perdesaan, dapat berkembang jika didukung oleh sumber daya lokal, kearifan lokal, dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif membutuhkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang lebih baik untuk memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada wilayah perdesaan.

Pemasaran wisata, infrastruktur, sarana, sumber daya manusia, karakter dan budaya masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia adalah beberapa hal yang dapat mendorong integrasi wisata. Kelima hal ini dapat menjadi lebih menarik jika digabungkan untuk membuat perjalanan yang menyenangkan dan atraksi yang berkesan.

Menurut Landecker dalam David (1986), ada empat kategori integrasi yang berbeda. Yang pertama adalah integrasi budaya, yang berarti ada konsistensi di antara norma budaya dan tingkah laku masyarakat. Integrasi

budaya dapat dilihat dari kearifan lokal suatu desa. Interaksi manusia dengan lingkungannya menghasilkan kearifan lokal yang bertahan lama, yang biasanya muncul melalui proses internal. Sistem nilai yang dibentuk oleh common law, kepercayaan dan budaya lokal akan muncul sebagai hasil dari proses evolusi yang panjang ini. Oleh karena itu, kearifan lokal pada dasarnya merupakan norma yang dianut oleh masyarakat dan dipercaya sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut Geertz (1973), kearifan lokal sangat penting untuk martabat dan martabat manusia dalam masyarakat. Salah satu elemen yang dapat membantu mengembangkan pariwisata perdesaan yang menekankan pada paradigma berbasis masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah kearifan lokal (Vitasurya, 2016). Yang kedua adalah integrasi normatif, yang berarti ada konsistensi dengan norma sosial dan standar budaya. Yang ketiga adalah integrasi komunikatif, yang berarti ada intensitas hubungan komunikasi yang didasarkan pada sistem sosial. Yang terakhir adalah integrasi fungsional, yang berarti ada kebebasan dan tidak terikat. Menurut Wirth, alat komunikasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan antara unit-unit yang berbeda (David, 1986). Semua sumber daya manusia, objek atraksi, dan pemerintah tentunya menginginkan keuntungan besar adalah manufaktur utama yang sangat memungkinkan. Dari titik ini, kesadaran bersama bahwa meningkatkan kunjungan wisata hanya dapat dicapai dengan mengintegrasikan stakeholder yang ada.

Stakeholder yang ada harus terus berkomunikasi untuk membuat wisatawan merasa aman dan nyaman. Sehingga perkembangan pariwisata di tahun-tahun mendatang dapat dilakukan secara bertahap dan tidak secara parsial, blueprint model pariwisata harus dibuat melalui komunikasi. Kondisi

transportasi adalah salah satu masalah kecil yang perlu dibahas oleh pihak berwenang, yaitu pemerintah dan bisnis wisata. Kondisi jalan masih membutuhkan pembenahan yang lebih besar mengingat banyaknya kendaraan yang melintasi jalan. Namun, suatu tempat harus dapat diakses dengan mudah dan nyaman jika ingin mencapai tujuan pariwisatanya.

Desa wisata adalah bentuk integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan adat istiadat. Masyarakat diberdayakan melalui potensi alam, lahan pertanian, dan perkebunan yang didukung oleh kelompok pengembang desa yang sadar wisata. Untuk pembangunan yang berkelanjutan, program pengembangan desa wisata harus bekerja sama dengan kelompok sadar wisata, tokoh masyarakat, kelompok muda, dan fasilitasi pemerintah desa. Peluang pengembangan desa wisata didorong oleh kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata yang berfokus pada potensi lingkungan alam, masyarakat, kehidupan pertanian, dan perkebunan. Pembangunan wisata desa tertentu membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, akses teknologi yang mudah, dan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Berdasarkan Tingkat perkembangan, desa wisata terbagi menjadi tiga kategori.

1. Desa wisata embrio adalah desa yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat atau desa untuk mengelolanya menjadi wisata.
2. Desa wisata berkembang: Desa wisata awal sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, memiliki swadaya masyarakat dan desa untuk

mengelolanya, mulai melakukan promosi, dan wisatawan mulai tertarik untuk berkunjung.

3. Desa wisata maju adalah desa yang telah berkembang karena banyaknya kunjungan wisatawan dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola seperti koperasi dan badan usaha milik desa (bumdes). Mereka juga sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran.

Di Kalimantan sudah terdapat 70 desa wisata dengan posisi terbanyak desa wisata berada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebanyak 19 desa wisata. 53 desa di Kalimantan Tengah masih berada pada kategori embrio sehingga masih perlu dirintis dengan kerjasama pemerintah dan masyarakatnya. Kemudian, 14 desa wisata berkategori berkembang dan tiga desa wisata berkategori maju (dilansir dari kalteng.jadesta.com).

Pengelolaan desa wisata di Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan mengembangkan integrasi pengetahuan, atraksi dan kuliner yang ada. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata di daerahnya adalah dengan mengimplementasikan Sapta Pesona. Sapta Pesona ini juga dapat menjadi perwujudan dari integrasi normatif. Tujuan dari Sapta Pesona adalah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan teroganisir saat memulai kegiatan wisata. Sapta Pesona memberikan gambaran tentang jenis pelayanan yang dapat dilakukan di lokasi wisata dan menjadikannya kebiasaan yang baik untuk diterapkan dalam bisnis pariwisata. Sapta Pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah sehingga mulai dari kepala Negara hingga masyarakat di tingkat RT atau

desa dapat menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, kesejukan, keindahan, ramah tamah, dan memberikan kenangan yang berkesan kepada wisatawan. Sosialisasi Sapta Pesona melalui Sadar Wisata menjadi tantangan insan wisata dengan seluruh masyarakat ikut berpartisipasi.

Sapta Pesona adalah program yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesadaran wisata dan memberikan ajakan, arahan, dan panduan agar masyarakat memahami dampak dari program Sapta Pesona. Ini adalah salah satu inovasi yang didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong iklim berwisata yang mendukung pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah atau tempat (Depbudpar: 2008).

Memberikan ajakan, arahan, dan panduan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti sosial media atau website. Selain itu, sosial media atau website juga dapat digunakan sebagai media promosi. Media promosi adalah bagian dari manajemen pariwisata atau ecopromotion, dan berfungsi untuk menyebarkan informasi. Untuk branding Desa, sangat penting untuk menggunakan sosial media untuk mempromosikan setiap produk Desa. Diharapkan dengan media promosi ini, berbagai potensi Desa akan dibahas secara menyeluruh. Ini akan memberi masyarakat umum kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang Desa wisata yang ada. Sosial media yang dapat dikunjungi yaitu Instagram milik dinas kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah dengan username disdubparkalteng dan website seperti jadesta, pariwisata Kalimantan Tengah atau dapat mengunjungi langsung

website desa wisata di Kalimantan Tengah seperti website desa ujung pandaran.

Dengan implementasi Sapta Pesona maka Sumber Daya Manusia pada suatu desa juga dapat berkembang. Sumber Daya Manusia merupakan unsur penting dalam mewujudkan integrasi wisata di Kalimantan Tengah. Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing baik keindahan alamnya, keunikan tradisinya, keunikan budayanya, makanan atau minuman yang khas, kerajinan-kerajinan khas, situs-situs sejarah, hasil bumi Desa dan ekonomi kreatif Desa. Semua ini tentu tidak semua bisa dimiliki oleh Desa, tetapi apapun potensinya Desa bisa mengoptimalkan menjadi sebuah daya Tarik Desa. Potensi desa dapat dicari tahu oleh penduduk desa tersebut. Dengan meneliti lebih dalam lagi apa yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa dari desa mereka, maka suatu desa wisata dapat beralih kategorinya menjadi lebih baik lagi. Masyarakat desa dapat menjadi subjek maupun objek dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat dapat memberikan edukasi mengenai adat-istiadat desa mereka ataupun menumbuhkan ekonomi kreatif yang memberikan penghasilan seperti kerajinan tangan atau makanan khas desa yang menjadi daya tarik wisatawan.

Selalu ada dampak akibat kegiatan wisata namun setiap Desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pengaruh sosial ekonomi dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang timbul akibat adanya kegiatan yang mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, baik dalam hal kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan. Dalam bentuk dinamis, hubungan sosial akan berbentuk interaksi sosial antar individu dan kelompok dalam komunitas tersebut. Sehingga masyarakat Desa harus memegang teguh sistem nilai yang

dimiliki dengan hadirnya wisatawan dengan kultur yang berbeda. Dinamika perubahan kondisi-kondisi lingkungan pun akibat dari adanya pembangunan wahana wisata harus diminimalisir terkait dampak lingkungan yang muncul sebagai upaya membangun Desa wisata yang ramah lingkungan.

Daya tarik desa wisata sangat beragam. Daya Tarik tersebut dapat menjadi potensi sebuah desa menjadi desa wisata. Ada karena tempat wisatanya, ada karena religi masyarakat desanya, ada karena makanan khasnya, adapula karena budaya adat-istiadat yang dianut oleh masyarakat desa. Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan Tengah. Dayak Ngaju merupakan Dayak asli yang menempati Kalimantan Tengah. Terdapat adat-istiadat khas Dayak Ngaju terutama bagi penduduk yang beragama Kaharingan. Pada Jurnal yang ditulis oleh Carlos Iban dan Tuti Elfrida pada judul “Arsitektur Religi Pesta Tiwah Dayak Ngaju Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kalimantan Tengah” menyebutkan bahwa pesta Tiwah dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata budaya dengan tetap menjaga nilai-nilai sakralnya agar terhindar dari komersialisasi dan komodifikasi budaya.

Penelitian Carlos Iban dan Tuti Elfrida dilakukan di dua Lokasi yang berbeda, yaitu Desa Tumbang Koling, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Desa Ramang, Kabupaten Pulang Pisau. Tujuan dari Pesta Tiwah adalah untuk menghantarkan roh leluhur kita ke alam keabadian yang sempurna dan indah (Dyson dan Asharini, 1980: 66). Pesta Tiwahmer adalah prosesi penguburan sekunder di mana tulang-belulang individu yang telah meninggal diambil dan dimasukkan ke dalam sandong, sebuah wadah baru untuk kubur. Masyarakat Dayak Ngaju beragama

Kaharingan percaya bahwa jika keluarga tidak melakukan prosesi Pesta Tiwah bagi sebelum kematian, jiwa jenazah akan tetap di dunia dan tidak dapat pergi ke Lewu Tatau. Itu sebabnya hukumnya bagi orang Dayak Ngaju untuk mengadakan Pesta Tiwah wajib. Ini terutama berlaku untuk orang-orang yang masih menganut agama Kaharingan. Masyarakat Dayak Ngaju percaya bahwa jiwa orang yang sudah meninggal pergi ke dimensi keabadian di langit ketujuh melalui ritual Pesta Tiwahakan. Menurut Schiller (1997: 30), Lewu Tatau disebut sebagai "Desa Sejahtera Berpasirkan Emas, Pantai Berlian, Beralaskan Sutera, Berkerikilkan Manik-Manik, Tempat Yang Megah Di Mana Tulang dan Daging Tiup Tidak Pernah Hancur". Dimensi tempat keabadian roh ini berada di Lewu Tatau, tepatnya di lapisan langit ke tujuh.

Masyarakat Dayak Ngaju percaya bahwa kehidupan manusia di bumi dan kehidupan roh di Lewu Tatau akan tenang dengan kehadiran simbol-simbol dari ruang transenden yang muncul di ruang realitas melalui mediator ritual sakral Pesta Tiwah. Struktur yang dikenal sebagai sapundu dan sandong adalah representasi material dari ritual penguburan sekunder. Sapundu dibuat dengan figur manusia atau hewan dari kayu ulinatau borneo ironwood (*Eusideroxylon zwageri*). Ini digunakan untuk menggambarkan roh leluhur, juga dikenal sebagai sangiang. Wujud sapundu menunjukkan sifat dan perilaku sangiang. Untuk menemani dan membantu jiwa yang di-Tiwah-kan dalam perjalanan mereka ke Lewu Tatau, roh leluhur diwujudkan dalam bentuk sapunduberguna. Apabila yang di-Tiwah-kan adalah laki-laki, sapundu berwujud perempuan yang dibuat, begitu pula sebaliknya jika perempuan yang akan di-Tiwah-kan makan sapundu laki-laki. Dalam

beberapa kasus, sapundujuga dibuat dalam bentuk binatang atau manusia setengah siluman, tergantung pada bentuk sangiangyang yang diharapkan untuk memudahkan perjalanan ke angkasa.

Selama Pesta Tiwah, hewan kurban dimasukkan ke dalam sapundu yang didirikan di tempat terbaik di suatu desa. Ini bertahan selama bertahun-tahun dan menunjukkan tanggung jawab keluarga kepada leluhurnya. Hewan kurban yang diikat ke dalam sapundu harus berlawanan jenis kelamin dengan sapundu. Sandongatau sandung adalah bangunan kubur sekunder yang menyerupai rumah panggung kecil. Tulang-belulang manusia yang telah melalui proses ritual Pesta Tiwah disimpan di dalam sandong. Sandong yang ideal terbuat dari kayu ulin, seperti sapundu. Model sandong mirip dengan rumah mini tradisional dengan atap, pintu, dan jendela kecil. Atap wadah kubur ini sering mengandung gambar burung kecil. Seorang informan mengatakan bahwa burung ini diberi nama "piak"nya, dan dia akan menjadi milik salumpuknya (jiwa orang yang telah meninggal) di Lewu Tatau.

Nilai kearifan Pesta Tiwah sebagai warisan budaya dapat dikembangkan menjadi produk pariwisata Kalimantan Tengah dan menarik wisatawan dari luar dan dalam negeri, terutama bagi kelompok wisatawan yang tertarik pada keunikan warisan budaya. Selain itu, karena Pesta Tiwah sebagai warisan budaya memiliki daya tarik wisata yang kuat, pengembangannya sebagai produk pariwisata memerlukan modal budaya yang kuat, bukan modal ekonomi.

Masyarakat Dayak Ngaju secara efektif membagi wilayah sakral dan non-sakral saat mengembangkan wisata budaya. Artinya, terdapat wilayah yang hanya dapat diakses

oleh wisatawan dan wilayah lain dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat lokal Dayak Ngaju. Selain itu, dalam konteks wisata budaya, tujuan pengembangan Pesta Tiwah adalah untuk mempertahankan nilai-nilai spiritual dan non-spiritual dari ritual keagamaan daripada menarik wisatawan.

Selain menemukan ritual adat keagamaan suku Dayak, Pada umumnya, suku dayak memiliki warisan kearifan lokal yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dalam hal ini, mereka menggunakan tumbuhan liar sebagai makanan sehari-hari, dan tumbuhan liar ini dapat ditemukan di tengah hutan atau di sekitar perkarangan rumah (Alexandro, Uda, & Pane, 2020).

Kuliner adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan telah berkembang menjadi sektor wisata. Sekarang istilah "wisata kuliner" menjadi populer karena orang-orang tidak hanya dapat makan, tetapi mereka juga dapat melakukan perjalanan dan memenuhi hasrat aktualisasi diri mereka di media sosial dengan mengunggah foto-foto perjalanan mereka di media sosial pribadi. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa kuliner menjadi salah satu daya tarik pariwisata lokal Indonesia. Kalimantan adalah salah satu negara dengan makanan dan alam yang luar biasa. Masyarakat Dayak adalah penduduk asli pulau ini. Mereka memiliki berbagai makanan yang lezat dan sehat yang diolah dengan cara yang unik.

Pada jurnal yang ditulis oleh Septo, dkk pada judul "Eksplorasi Kekayaan Kuliner Masyarakat Suku Dayak Ngaju di Desa Mandomai Kalimantan Tengah" diketahui beberapa makanan khas Kalimantan Tengah yang dapat menjadi potensi desa wisata di desa tersebut. Antara lain:

1. Juhu Umbut Rotan: Umbut Rotan, juga disebut uwut nang'e, adalah makanan suku Dayak yang terbuat dari rotan muda. Setelah dibersihkan, kulit rotan dibuang dan dipotong menjadi potongan kecil. Ikan baung, terong asam, dan bumbu digunakan untuk memasak rambut roti. Kuliner ini memiliki rasa gurih, asam, dan sedikit pahit yang dikombinasikan dengan manisnya daging ikan.
2. Juhu Umbut Sawit: Juhu Umbut Sawit adalah makanan favorit yang paling banyak dicari oleh pecinta kuliner yang datang ke Kalimantan Tengah. Makanan ini menjadi favorit dan harus dihidangkan di acara besar seperti syukuran karena rasanya yang gurih, nikmat, dan lezat.
3. Kalumpe/Karuang: Kalumpe atau karuang adalah sayuran yang terbuat dari daun singkong yang telah ditumbuk. Bahasa Dayak Maanyan mengatakan Kalumpe, sedangkan bahasa Dayak Ngaju mengatakan Karuang. Kalumpe dibuat dengan menumbuk daun singkong hingga halus, lalu dicampur dengan terong kecil atau terong pipit dan dicampur dengan bumbu bawang merah, bawang putih, serai, dan lengkuas. Makanan ini biasanya disajikan dengan sambal terasi.
4. Wadi: Wadi adalah makanan yang dibuat dengan ikan atau kadang-kadang daging babi. Cara membuatnya adalah dengan membersihkan daging atau ikan terlebih dahulu, kemudian direndam dalam air garam selama lima hingga sepuluh jam. Setelah itu, daging atau ikan diangkat dan dibiarkan mengering. Setelah ikan atau daging kering, campurkan Sa'mu dengan baik dan simpan dalam wadah yang kedap udara dan tertutup rapat. Simpan ikan tiga hingga lima hari, dan daging lebih dari seminggu. Wadi harus digoreng atau dimasak terlebih dahulu sebelum disantap.

5. Juhu Taya: Pengolahan juhu taya dengan ikan bapuyu adalah masakan berkuah yang mirip dengan juhu taya yang biasa dibuat oleh orang Dayak. Masakan ini memiliki bumbu yang sama dan rasa unik dari daun taya yang membedakannya. Suku Dayak sangat menyukai sayuran berkuah dengan bumbu dan bahan yang sama.
6. Juhu Umbut Rotan: Ternyata kekayaan kuliner Pulau Kalimantan dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari hutan tropis. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang rebung. Namun, makanan sejenis rebung yang disebut juhu umbut rotan juga dapat ditemukan di Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rotan yang masih muda digunakan untuk membuat Juhu Umbut Rotan, makanan khas Kalimantan Tengah, yang terbuat dari ujung rotan yang masih muda. Saat menghilangkan duri di sekeliling batang rotan, proses pembuatan makanan tradisional ini membutuhkan energi tambahan. Rotan kemudian dipotong menjadi potongan kecil dan diberi bumbu rempah tertentu. Umbu rotan dapat dimasak dengan santan atau tidak. Kuliner seperti umbu rotan biasanya disajikan dengan ikan patin atau nila bakar.
7. Tanaman Kelakai: Ada keyakinan bahwa itu dapat mengobati diare, menambah darah, dan menjaga kulit awet muda. Kuliner kelakai biasanya dibuat menjadi camilan seperti keripik. Suku Dayak Kalimantan Tengah membuat keripik kelakai dari bagian daun yang masih muda. Selanjutnya, daun kelakai diolesi dengan adonan tepung bumbu dan digoreng dalam minyak panas. Di mulut, keripik kelakai yang sudah jadi memiliki rasa gurih dan tekstur yang renyah.

8. Lemang: Adalah makanan yang menurut sejarah dibuat pertama kali oleh orang Melayu. Makanan ini tersedia di bagian utara Indonesia karena masyarakat Melayu menyebar secara luas ke seluruh Indonesia. Seperti halnya di Kalimantan, di mana banyak penduduk Melayu tinggal, sebagian orang percaya bahwa lemang adalah makanan khas Kalimantan Tengah. Selain orang Melayu, orang Dayak juga makan lemang pada pesta adat mereka. Lemang adalah makanan sejenis lontong atau ketupat yang dibuat dari beras ketan. Beras ketan dimasak melalui proses pematangan khusus, yaitu dimasak dalam seruas bambu. Sebelum dimasukkan ke dalam bambu, beras ketan harus digulung dengan daun pisang atau daun bambu.
9. Kue Gagatas: adalah kue beras ketan tradisional. Selama paceklik, orang Kalteng sering makan kue gagatas. Selain di Kalimantan, Anda juga dapat menemukan kue getas di Surabaya dan daerah sekitarnya. Di pasar tradisional, kue ini banyak dijual sebagai camilan atau jajanan. Tidak mengherankan bahwa kue ini memiliki banyak penggemar karena harganya yang terjangkau.

Beberapa makanan khas di atas dapat menarik wisatawan mengunjungi wisata-wisata di Kalimantan Tengah. Makanan khas daerah Kalimantan Tengah juga dapat berpotensi dalam mengembangkan wisata berbasis wisata kuliner. Hal ini menumbuhkan ekonomi kreatif dalam masyarakat.

Implementasi kawasan wisata terintegrasi didasarkan pada dua kepentingan: pengembangan kebudayaan dan pengelolaan wisata alam, seni inovasi kreatif, dan makanan khas daerah. Ini merupakan bagian penting dari menumbuhkan kekuatan budaya lokal yang memiliki nilai jual unik sebagai dasar untuk memasyarakatkan keunggulan komparatif dalam hal budaya dan pariwisata. Pengelolaan kawasan Wista dengan mensinergiskan berbagai kepentingan melalui keterpaduan pengelolaan dan penguatan promosi mencerminkan pengelolaan wisata budaya dan alam secara terpadu untuk mengoptimalkan aset kepariwisataan dan kebudayaan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan penting *Community Based Tourism* dan *Community Based Culture and Nature Centered*.

# **BAB VI**

## **KENDALA ATAU PERMASALAHAN PARIWISATA**

---

### **A. Teori Kendala**

Optimized Production Technology (OPT) adalah evolusi dari Theory of Constraints (TOC). Dr. Eliyahu M. Goldratt, seorang ilmuwan fisika Israel, pertama kali memperkenalkan teori ini dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1986, "Tujuan: A Process of Ongoing Improvement." Menurut Fogarty (1991)

Teori OPT—juga dikenal sebagai teori kendala atau teori kendala—menekankan optimalisasi pemanfaatan stasiun kendala. OPT adalah metode untuk mengoptimalkan penjadwalan produksi dengan tujuan meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual (Throughput), mengurangi persediaan (Inventory), dan mengurangi biaya operasional. Goldratt telah menciptakan konsep OPT yang memasukkan filosofi manajemen ke dalam perbaikan, karena dia menemukan hambatan untuk meningkatkan keuntungan.

Menurut dasar TOC, setiap organisasi memiliki kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang tinggi, atau kinerja. Kendala-kendala ini harus ditemukan dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya dalam jumlah terbatas dan tidak berarti kendala kapasitas. Setelah satu kendala dipecahkan, kendala berikutnya dapat ditemukan dan diperbarui.

Goldratt membuat lima langkah berurutan untuk menerapkan gagasan sebagai solusi untuk masalah. Ini dilakukan agar proses perbaikan menjadi lebih fokus dan memiliki dampak positif yang lebih besar pada sistem sebelumnya. Ini adalah langkah-langkahnya:

1. Temukan sumber daya (penghalang) sistem, dan berikan prioritas berdasarkan pengaruh terhadap tujuan. Walaupun banyak masalah mungkin muncul pada satu titik, biasanya hanya ada sedikit masalah nyata dalam sistem itu.
2. Tentukan cara untuk menghilangkan hambatan tersebut; pada tahap ini, dipertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
3. Dapatkan sumber daya tambahan untuk mendukung langkah kedua dengan menghentikan hal-hal lain yang bukan hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Karena sumber daya masih cukup tersedia, hilangnya kendala tidak berdampak.
4. Lakukan kendala untuk meningkatkan kinerja kendala sistem. Prioritaskan solusi masalah untuk kendala sistem yang tidak memuaskan.
5. Jika ada hambatan di langkah sebelumnya, kembali ke langkah pertama untuk mempertahankan kemajuan.

## **B. Kendala**

Segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dianggap sebagai kendala. Dua kategori utama kendala adalah batasan fisik dan non-fisik. Batasan fisik berkaitan dengan kemampuan mesin, sedangkan batasan non-fisik berkaitan dengan kebutuhan konsumen terhadap produk dan prosedur kerja. Menurut Fogarty (1991).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 667) mengatakan bahwa kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia oleh Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2008: 329), Menurut William J. Smith kendala adalah sesuatu yang menghambat atau menghalangi seseorang untuk mencapai sasarannya. Rintangan atau halangan juga disebut sebagai kendala.

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2006: 563), kendala adalah halangan atau rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2005: 543), kendala adalah situasi yang membatasi, menghalangi, atau mencegah seseorang mencapai tujuan yang diinginkan.

Kendala, menurut beberapa pendapat, adalah suatu kondisi yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.

### **C. Pengembangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi baru atau meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution), dan perubahan secara bertahap adalah semua istilah yang umumnya mengacu pada pengembangan. Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) mengatakan bahwa pengembangan adalah proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam fitur fisik.

Pengembangan secara khusus berarti proses pembuatan materi pembelajaran. Menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012), pengembangan memfokuskan pada analisis kebutuhan dan aspek luas dari analisis awal, seperti analisis kontekstual. Hasil uji lapangan akan digunakan untuk membuat produk, yang merupakan tujuan pengembangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Pengembangan" secara etimologi yaitu berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. M. Arifin, Med, "pengembangan" secara etimologi berarti proses; perubahan yang lebih baik.

Kata "pengembangan" secara istilah mengacu pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau metode yang baru sambil terus menilai dan menyempurnakannya. Ketika alat atau metode tersebut akhirnya dianggap cukup stabil untuk digunakan selanjutnya, kegiatan pengembangan tersebut berakhir.

Secara terminologi, ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi pengembangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Drs. Iskandar Wiryokusumo, M.sc., pengembangan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras dengan bakat.
2. Menurut Prof. Dr. H. M. Arifin, MD, pengembangan dalam pendidikan berarti suatu proses perubahan bertahap ke tingkat yang lebih luas, mendalam, dan berkecenderungan ke arah kesempurnaan atau kematangan.

3. Menurut Edwin B. Flippo, "Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh," sedangkan "Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu".
4. Sementara Andrew F. Sikula mendefinisikan latihan sebagai "latihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum", pengembangan didefinisikan sebagai "pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi."

#### **D. Pariwisata**

Menurut Norval dalam Muljadi dan Nurhayati (2002, h.80), pariwisata adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan orang asing masuk, tinggal, dan bergerak di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu.

Menurut definisi yang lebih luas, yang diberikan oleh Kodhyat (1983, h.4), pariwisata adalah perjalanan sementara dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi alam, sosial, budaya, dan intelektual. Selain itu, menurut Musanef (1995, h.11), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain.

Menurut Yoeti (2008:8) pariwisata harus memenuhi empat kriteria: 1) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, di luar tempat kediaman orang biasanya tinggal; 2) tujuan perjalanan adalah untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari nafkah di negara, kota, atau DTW yang dikunjungi; 3) wisatawan membawa uang mereka dari negara asalnya, di mana mereka dapat tinggal atau berdiam diri, dan 4). Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Karena industri pariwisata hampir tidak menimbulkan polusi atau kerusakan lingkungan, pariwisata menjadi topik yang populer untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa negara dari sektor nonmigas. Banyak ahli telah membahas definisi pariwisata.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang mencakup berbagai aspek dan disiplin yang mencakup interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan bisnis.. Dan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu singkat. Orang yang melakukan wisata disebut wisatawan.

Pariwisata, menurut definisi yang lebih luas, adalah perjalanan singkat dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam upaya mencari keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan hidup mereka dalam aspek alam, sosial, budaya, dan ilmu (Spillane, dalam Pitana, 2001). Selain itu, pariwisata dianggap sebagai gejala abad modern yang didasarkan pada

keinginan untuk kesehatan dan kesejahteraan, keindahan alam, kesenangan, dan peningkatan perekonomian masyarakat sebagai akibat dari perkembangan niaga, industri, dan transportasi.

Namun, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dalam jangka waktu singkat untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Dalam arti kontemporer, pariwisata adalah gejala kehidupan modern yang didasarkan pada kebutuhan akan kesejahteraan dan penggantian udara, penghargaan yang lebih besar terhadap keindahan alam, kesenangan, dan kenikmatan alam semesta, serta peningkatan pergaulan antar bangsa dan kelas sosial sebagai akibat dari berkembangnya hasil perkembangan niaga, industri, dan transportasi.

### **E. Kendala Pengembangan Pariwisata**

Dalam jurnal yang ditulis oleh I Gede Sunarjaya, dkk dengan judul “Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu Kecamatan Mengwi, Bandung” menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata tersebut adalah karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya program kerja di desa wisata; faktor kedua adalah lingkungan yang tidak bersih; faktor ketiga adalah tata ruang yang buruk; faktor keempat adalah kurangnya pelatihan dan penyuluhan pariwisata, khususnya di desa wisata; dan faktor kelima adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur pariwisata di Desa Wisata Munggu.

Dengan partisipasi pemerintah yang minim dalam pembangunan Desa Wisata Munggu, daya tarik wisata hanya dapat ditentukan. Namun, peranannya masih belum maksimal dan belum ada dana yang dialokasikan. Karena keterbatasan pengalaman dan keahlian, khususnya dalam bidang pariwisata, masyarakat belum berpartisipasi sepenuhnya dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan. Sementara itu, pelaku usaha wisata masih kurang berpartisipasi dalam perkembangan desa wisata Munggu karena belum adanya atraksi sehari-hari, faktor pendukung seperti fasilitas yang kurang, promosi dengan menjual paket-paket wisata yang belum pasti, dan sinergi.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Soedarso dkk dalam judul penelitian “Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro)” mengatakan upaya untuk berkembang di bidang pariwisata banyak mengalami kendala, sehingga sektor ini tampak tidak banyak berkembang. Hampir sebagian besar objek wisata di kabupaten Bojonegoro berada di wilayah yang dikelola oleh dinas kehutanan, menurut beberapa orang yang dapat diandalkan, seperti Sekretaris Dinas Pariwisata Bapak Sudaris Yuwono, Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Bapak M. Ahmad, dan staf dari bagian kebudayaan Bapak Saeran. Sementara itu, koordinasi dengan dinas kehutanan selama ini gagal. Pengembangan pariwisata selama ini agak terhambat oleh kondisi ini.

Menurut Bapak Sudaris Yuwono, dalam perkembangan terakhir, Bapak Bupati telah bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan objek wisata, terutama Tirta Wana, yang akan digabungkan dengan

Kolam Renang dan Water Boom, Lapangan Golf, Khayangan Api, Agrowisata, dan Hutan Lindung. Investor dan konsultan telah siap hadir. Wisata Tirta Wana akan setara dan terhubung sebagai paket destinasi wisata mendampingi WBL (Wisata Bahari Lamongan) di masa mendatang. Pemerintah Jawa Timur memiliki rencana untuk menggabungkan paket wisata dari tiga kabupaten: Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Pengembangan objek wisata Tirta Wana masih belum berjalan lancar meskipun ada investor yang berminat. Ini karena mereka masih bernegosiasi dan bekerja sama dengan dinas kehutanan.

Semua infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pariwisata tersedia, termasuk sikap masyarakat lokal terhadap pendatang, kekayaan budaya lokal, dan tempat penginapan dan hotel. Di Bojonegoro, ada banyak pilihan hotel, mulai dari kelas melati hingga berbintang, yang selama ini menampung pekerja migas dari dalam dan luar negeri. Selain itu, seni dan budaya masyarakat terus dilestarikan. Untuk mempromosikan kekayaan khasanah budaya dan masyarakat Bojonegoro, acara seni budaya nasional dan internasional sudah sering diikuti. Seperti yang disebutkan di atas, elemen pendukung yang potensial harus bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata. Untuk mencapai hal ini, belum terjadi apa pun dan upaya terus dilakukan.

Pada penelitian yang ditulis oleh Kusen, dkk dengan judul “Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Desa Sawarna” mengatakan Ada beberapa strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Mereka termasuk 4 (empat) masalah strategis: sumber daya manusia dan kemampuan pariwisata; sinergi dan kemitraan; pemanfaatan data dan informasi; dan daya saing destinasi pariwisata.

Dengan mempertimbangkan klasifikasi sebelumnya, tampaknya pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menghadapi masalah strategis. Namun, keempat komponen ini tampaknya masih tertatih-tatih secara empiris. Akibatnya, kendala-kendala ini masih muncul di ruang publik, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata karena modal kemitraan dan sinergitas masih kurang. Meskipun demikian, untuk menciptakan iklim pariwisata yang baik, diperlukan ide yang kuat yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dan lokal melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melibatkannya dalam proses pembangunan.

Di samping itu, karena pemerintah belum melakukan upaya yang konsisten untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, kunjungan wisatawan ini masih terbatas. Jadi, pengembangan pariwisata terhambat oleh kurangnya komitmen kolektif. Menurut Herdiana (2019), pengembangan pariwisata modern menghadapi tantangan karena peran masyarakat yang kurang efektif dalam pengembangan pariwisata. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terhambat.

## **F. Kendala Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Tengah**

Pengembangan objek wisata adalah upaya untuk meningkatkan suatu tempat atau wilayah yang memiliki objek wisata yang dianggap penting untuk dikelola dengan cara yang akan berdampak positif dan optimal pada pembangunan dan kehidupan masyarakat luas. Pembangunan objek wisata bergantung pada prinsip

kelangsungan ekologi, kelangsungan kehidupan sosial, kelangsungan ekonomi, dan peningkatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat setempat. Atraksi, transportasi, akomodasi, dan layanan yang ditawarkan kepada pengunjung adalah komponen penting dalam pengembangan potensi pariwisata (Zulfa Zamalie 2019).

Dewi Setiawati (2018) menyatakan bahwa jika pengembangan wisata dipadukan dengan perjalanan wisata lainnya atau paket, tercipta kerjasama dengan biro perjalanan (transportasi dan akomodasi), dan yang lebih penting lagi, pembinaan yang berkelanjutan dan pengelolaan yang serius akan menjadi lebih hidup dan berkembang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakannya, terutama dalam sektor pariwisata. Pusat pertumbuhan sektor ini terletak di wilayah tengah Palangka Raya, dan belum ada upaya yang serius untuk menerapkan kebijakan destinasi dan memasarkannya. Destinasi belum dibangun secara optimal (Borneonews, 2017). Begitu juga dengan masalah pemasaran, di mana pemerintah daerah di luar Provinsi Kalimantan Tengah yang membantu.

Semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah seharusnya menyambut baik pelaksanaan Peraturan Daerah seiring berjalannya waktu, tetapi ini belum terjadi. Informasi yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak mendukung kebijakan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di wilayahnya. Peraturan daerah turunan yang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/

Kota seharusnya menunjukkan dukungan pemerintah kabupaten/kota tersebut. Pemerintah kabupaten /kota tampaknya belum memprioritaskan sektor pariwisata. Hal ini tentu sangat disayangkan sekali mengingat potensi wisata yang begitu besar yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat dalam hal pemasaran adalah bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan promosi pariwisata Kalimantan Tengah dengan sangat baik. Ini terbukti dengan mengadakan Festival Budaya Isen Mulang setiap tahun di bulan Mei, mempromosikan melalui brosur dan pamflet yang disebar di tingkat nasional selama pameran, dan menggunakan situs web resmi Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan, studi yang dilakukan oleh Tamelan dan Harijono (2019) membahas ide ekowisata sebagai cara untuk mengembangkan pariwisata. Untuk meningkatkan minat wisatawan, konsep ekowisata yang tepat adalah mempertahankan kearifan lokal dan gotong royong untuk membuat makanan lokal. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, menunjukkan peningkatan daya tarik wisata yang sudah ada dan peluang untuk pembangunan objek wisata baru. Hasil menunjukkan bahwa pelaku ekowisata sangat terbantuan dan bahwa kegiatan telah mencapai sasarannya. Selain itu, orang yang bekerja dalam ekowisata juga dapat mempromosikan barang-barang mereka dengan baik (Prihanta et al., 2017).

Yudhiantari (2002) menunjukkan bahwa Desa Wongaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, dapat menggunakan model ekowisata dengan menjual alam sebagai objek (atraksi) berbasis masyarakat. Selain itu, Ilyas (2009) menunjukkan bahwa objek dan kondisi masyarakat setempat memiliki daya dukung yang besar, tetapi infrastruktur dan tata kelola masih kurang. Selain itu, Soebagyo (2012) menyatakan bahwa, jika dikelola dengan baik, pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi suatu daerah.

Pengembangan desa wisata dan ekowisata menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah kurangnya program kerja desa wisata; yang kedua adalah lingkungan yang tidak bersih; dan yang ketiga adalah tata ruang yang buruk. Keempat, kurangnya pelatihan dan instruksi pariwisata, khususnya di desa wisata. Kelima, infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang kurang (Sunarjaya et al., 2018). Selain itu, kurangnya dana membuat pembangunan infrastruktur di daerah ekowisata menjadi sulit (Prastio dan Setiyono, 2019). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rani (2014) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata menghadapi tantangan infrastruktur yang belum mendukung pertumbuhannya.

Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara dimana didalamnya ada banyak indikator penggerak yang saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Pitana, Sirtha, Anom, et al, (2005) dalam “Hospitality and Tourism Education (The Case of Indonesia) menyatakan bahwa” Tourism has been one of the biggest industries in the world, seen from various indicators such as labor absorption, people movement, and income earned. For a number of countries and territories

tourism has been the biggest contributor in the formation of their gross domestic products” Terkait dengan itu, tidak hanya di daerah-daerah populer, Kalimantan Tengah juga memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan dengan keberagaman budaya dan potensi sumber daya alam yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. Kalimantan Tengah masuk ke dalam MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) koridor III pada tahun 2013 oleh karena itu perlu digali lebih dalam potensi pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor terkendalanya pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Budaya lokal merupakan warisan budaya yang penting, dan pemerintah setempat tidak memprioritaskan pengembangannya, yang menyebabkan masyarakat lokal tidak terlibat secara aktif dalam pembangunan pariwisata.
2. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal: Karena mereka tidak terlibat dalam pengembangan pariwisata, masyarakat lokal tidak menyadari betapa pentingnya aspek pariwisata untuk mendukung kehidupan masyarakat lokal.
3. Alokasi Dana yang Tidak Difokuskan: Pengembangan pariwisata tidak mendapat prioritas yang tepat dari dana pemerintah daerah.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Lokal: Masyarakat lokal tidak menyadari betapa pentingnya pariwisata untuk meningkatkan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata.

5. Kurangnya Kualitas Sarana dan Prasarana: Objek wisata alam Kalimantan Tengah tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk memenuhi semua aspek wisata, sehingga tidak dapat menarik wisatawan dengan baik.
6. Kurangnya Keterlibatan Pelaku Usaha: Pelaku usaha seperti ASITA, PHRI, dan HPI belum terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah, sehingga pengembangan pariwisata tidak mendapatkan dukungan yang optimal.
7. Kurangnya Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur, seperti Ripparkab dan Ripparkot, yang tidak tersedia di seluruh kabupaten/kota Kalimantan Tengah, menghalangi pertumbuhan pariwisata.
8. Kurangnya kualitas karyawan: Karyawan saat ini tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang tepat, sehingga kinerja aparatur tidak optimal dan pengembangan pariwisata terhambat.
9. Kurangnya Koordinasi: Untuk memaksimalkan wisata, provinsi dan kabupaten/kota harus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak terhambat oleh masalah koordinasi.
10. Kurangnya Inovasi dan Terobosan: Untuk menjadikan pariwisata sebagai ikon daerah dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi harus berani berinovasi dalam mengembangkan sektor ini agar semakin banyak wisatawan domestik dan asing.

### **g. Kendala Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan**

Pada kabupaten Barito Selatan, kendala pariwisata yang dihadapi terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama belum adanya strategi Pemerintah Daerah yang terfokus pada pengembangan Desa wisata, sehingga kurang efektifnya pengembangan Desa wisata. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan pariwisata hanya dilakukan secara umum di Kabupaten Barito Selatan. Faktor Kedua, minimnya Infrastruktur atau prasarana berupa jalan untuk menuju tempat wisata tersebut, sehingga banyak masyarakat yang mengalami kesulitan Ketika mendatangi wisata. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkat pembangunan infrastruktur serta fasilitas terbaik ditempat wisata agar wisatawan dapat berkunjung ketempat wisata. Faktor ketiga adalah belum lengkapnya paket wisata yang ditawarkan oleh Desa wisata serta kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat desa mengenai konsep desa wisata Dari beberapa faktor tersebut pengembangan desa wisata menjadi terhambat dan kurang maksimal.

### **h. Kendala Pariwisata di Kabupaten Barito Timur**

Kabupaten Barito Timur merupakan kota yang memiliki keragaman budaya dan tradisi yang selalu menarik untuk diperhatikan. Tidak hanya itu, juga memiliki sejumlah lokasi wisata budaya dan wisata alam yang potensial untuk dikembangkan seperti, Museum Lewu Hante/Rumah Betang, Liang Seragi, Makam Putri Mayang Sari, Konsera si Taman Anggrek Hitam, Makam Temanggung Jaya Karti, Lewu HanteTelang Siong dan Makam Suta Ono (Tamak Mas), Air Panas Malintut, Liang Ayah dan setangkai, Gunung Pukang, Dataran Tinggi dan Gunung Jodoh, Liang

Tawula, Riam Kendong, Riam Delayon, Bendungan Tampa, Bendungan Batu Putih, Wisata Pemancingan. Potensi wisata tersebut patut untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Dengan menata berbagai subsektornya, pariwisata menjadi sektor utama. Namun, pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, belum memanfaatkan sepenuhnya beberapa potensi wisata yang ada. Banyak tempat wisata yang menarik telah hilang dan tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah Taman Alam Liang Seragi, yang saat ini tertutup oleh hutan karena tidak terawat; Museum Lewu Hante dan Rumah Adat Betang, yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar, meskipun rumah adat tersebut sering digunakan untuk sanggar budaya dan acara adat lainnya, serta akses ke tempat wisata. Kondisi lingkungan, sarana dan prasarana objek wisata Kabupaten Barito Timur masih kurang memadai, serta daya tarik objek wisata masih relative belum banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, diperlukan adanya perhatian yang mendalam dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, agar upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan bisa memberikan hasil yang optimal dan menguntungkan bagi masyarakat lokal.

#### **i. Kendala Pariwisata di Kabupaten Murung Raya**

Pada jurnal yang ditulis oleh Merissa Octora pada tahun 2023 dengan judul Problematika Pengembangan Pariwisata Daerah di Murung Raya, Kalimantan Tengah diketahui bahwa kendala atau permasalahan pariwisata yang dihadapi di kabupaten Murung Raya adalah peran pemerintah yang masih kurang berfokus pada kebudayaan daerah yang merupakan komponen penting pariwisata,

memfokuskan program kerja untuk kegiatan budaya diluar dibandingkan ke dalam atau yang sifatnya tertentu saja ketika ada event khusus, tidak berbasis kepada budaya dan pengembangan masyarakat lokal, tidak memberdayakan masyarakat lokal untuk pelatihan atau manajemen organisasi budaya yang mengakibatkan perkembangan wisata budaya masih belum terorganisir dengan baik dan belum memfokuskan kepada program pariwisata berkelanjutan.

#### **j. Kendala Pariwisata di Kabupaten Seruyan**

Kalimantan Tengah memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata, khususnya tempat wisata berbasis alam. Pariwisata alam, adat istiadat, dan budaya memiliki daya tarik yang besar bagi para wisatawan. Namun, tentu saja, hal itu juga dapat menyebabkan kerugian, jadi manajemen yang baik harus bertanggung jawab untuk mengelolanya (Ferdinan et al., 2015).

Destinasi wisata di Kabupaten Seruyan baru saja dibuka, jadi sangat penting untuk memperhatikan pengelolaannya agar dapat beroperasi dengan baik dan menarik wisatawan domestik dan asing. Tempat wisata Desa Sungai Bakau juga mengalami dampak yang signifikan setelah pandemi COVID-19. Ini terlihat dari penurunan jumlah pengunjung dalam satu tahun terakhir, menurut data pengelola.

Jika wisata Desa Sungai Bakau ingin terus berkembang, semua pihak harus berkomitmen untuk mengelolanya. Semua pemangku kebijakan harus bekerja sama untuk membangun tempat wisata (Devy & Soemanto, 2017). Tidak diragukan lagi, pengelolaan tempat wisata harus dilakukan dengan terencana dan termanajemen dengan baik. Suatu pendekatan atau strategi tertentu harus digunakan untuk

mempromosikan destinasi wisata melalui media. Media merupakan wadah yang sangat penting untuk branding destinasi wisata. Dalam pengelolaan tempat wisata berbasis media branding, masyarakat memainkan peran yang sangat penting. Mereka berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan tempat wisata (Kagungan et al., 2020).

Tempat wisata di Desa Sungai Bakau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah masih dikelola secara sederhana. Semua pihak, termasuk pengelola dan masyarakat sekitar, harus bekerja sama untuk mengembangkan suatu tempat wisata. Untuk kepentingan bersama, keberadaan suatu tempat wisata akan menguntungkan masyarakat sekitar.

Beberapa temuan menunjukkan masalah utama. Tempat wisata di Desa Sungai Bakau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menghadapi masalah dalam beberapa hal, salah satunya adalah sarana dan prasarana. Dalam hal sarana dan prasarana, tempat wisata tersebut belum memiliki platform promosi digital seperti Instagram untuk mempromosikan tempat wisatanya secara lebih luas kepada masyarakat.

#### **k. Kendala Pariwisata di Kabupaten Katingan**

Di Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, ada banyak potensi pariwisata. Kabupaten Katingan memiliki banyak potensi wisata untuk dikembangkan dalam sektor pariwisatanya. Potensi wisata ini terdiri dari: (1) alam (bukit, air terjun, hutan, air panas alami, dan hutan); (2) budaya (tradisi, seni, dan upacara/ritual adat); (3) situs sejarah (seperti Bukit Batu dan museum); dan (4) desa tradisional dan pusat kerajinan rakyat.

Kendala pariwisata yang dihadapi di Kabupaten Katingan yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Katingan yaitu karena sumber daya manusia. Faktor penghambat berikutnya adalah masalah pendanaan, yang berarti bahwa anggaran tidak tersedia untuk unit-unit yang ditugaskan untuk menyusun rencana tersebut.

### **1. Kendala Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Setiap desa di Kabupaten Kotawaringin (Kobar) memiliki potensi untuk menjadi Desa Wisata yang dikelola, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, PAD, dan hal-hal lainnya. Untuk mengembangkan potensi pariwisata di desa, kelembagaan atau kelompok harus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata. Untuk mengelola dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) bertanggung jawab, dengan anggota dan pengurusnya terdiri dari masyarakat lokal. Pokdarwis adalah organisasi atau kelembagaan yang dilegalkan oleh Dinas Pariwisata atau Desa untuk meningkatkan pariwisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, yang memiliki dampak multipel.

Walaupun demikian, dalam pengembangan pariwisata seringkali terdapat berbagai masalah yang menghalangi pengurus kelompok sadar wisata untuk memetakan dan mengidentifikasi berbagai potensi, kemampuan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor-faktor penyebab yang tidak berjalan dengan baik dan maksimalnya pengembangan terdiri dari: 1) tidak adanya akses ke pasar atau pemasaran; 2). tidak adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan sumber daya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Brian L. Djumaty, dkk dengan judul “Identifikasi Potensi Desa Menuju Desa Wisata di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat” menunjukkan bahwa faktor kendala pengembangan pariwisata adalah belum memiliki kelembagaan (organisasi dan tenaga kerja) seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain itu, sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk mengelola pariwisata dengan baik, terbentuk organisasi pokdarwis di tingkat desa. Namun, diskusi kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi dan tenaga kerja belum siap untuk mengembangkan pariwisata.

Selain itu, jalan raya menuju tempat wisata di Kecamatan Kumai tidak memadai. Selain itu, ada beberapa masalah di destinasi, seperti kurangnya tempat sampah, keamanan, perbankan, kesehatan, sanitasi, lahan parkir, dan tempat ibadah. Selain hal-hal fisik, ada hal-hal non-fisik seperti kurangnya pendampingan dan pelatihan, penggunaan teknologi, kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan para pihak, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perencanaan pembangunan pariwisata.

### **m. Kendala Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Di provinsi Kalimantan Tengah, Sampit adalah ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur (KOTIM). Sampit memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dieksplorasi. Ecotourism, atau pariwisata berbasis alam, seperti pantai ujung pendaran, danau biru, bukit batu, air terjun kalap, dan sungai bakau, harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Selain keindahan alam, Sampit memiliki banyak wisata budaya dan sejarah. Kisah konflik antara suku Dayak dan Madura adalah salah satu yang menarik. Semuanya

memiliki daya tarik untuk menarik pengunjung untuk menikmati dan mempelajari budaya yang ada di sampit.

Pemerintah Sampit belum mencapai tujuan pertumbuhan pariwisatanya karena masih ada banyak sumber daya alam yang bagus untuk tempat liburan yang belum sepenuhnya dikembangkan. Kemudian ada tempat wisata yang kurang terawat, membuatnya tidak menarik lagi bagi pengunjung. Jadi, penting untuk mendukung semua orang untuk menjadikan Sampit sebagai tempat yang kreatif dan produktif yang dapat menguntungkan masyarakat lokal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gandes Dwi Ayuwangi dengan judul “Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Upaya Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021” mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pariwisata yang ada adalah masih sulitnya menemukan investor untuk diajak bekerja sama dalam membangun objek wisata. Selain itu, Karena masih adanya kekurangan ekonomi di Sampit, Pemerintah Kotawaringin Timur sangat memperhatikan cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sampit. Kelemahan yang sering terjadi adalah masyarakat tidak menyadari pentingnya menjaga dan merawat objek wisata Sampit, meskipun banyak objek wisata yang sudah diperbaiki oleh pemerintah. Namun, karena kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas wisata akhirnya rusak.

Pemerintah Kotawaringin Timur harus memprioritaskan perbaikan jalan yang masih rusak agar wisatawan dan masyarakat merasa nyaman dan tenang saat berkunjung ke objek wisata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika akses transportasi dan jalan tidak diperhatikan dengan baik, hal itu dapat membuat wisatawan tidak ingin berkunjung ke objek wisata.

## **n. Kendala Pariwisata di Kabupaten Palangkaraya**

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Wayan Sulastri, dkk dengan judul “Pengembangan Fasilitas Dalam Menarik Minat Wisatawan ke Objek Wisata Kahui di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya” menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi objek wisata yang berada di Kalimantan Tengah, terutama pada objek wisata Kahui.

Di kilometer 38, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kahui adalah salah satu objek wisata alam. Terletak tidak jauh dari pusat Kota Palangka Raya, hanya 40 km dengan waktu tempuh  $\pm$  60 menit. Salah satu keunggulan wisata Kahui adalah pemandangan hutan yang masih sangat alami, air sungai hitam yang unik, dan udara yang sejuk. Wisatawan juga dapat melakukan rafting menyusuri sungai dengan perahu, dan juga melakukan kemping. Salah satu daya tarik objek wisata Kahui adalah keunggulannya.

Objek wisata Kahui mengalami masalah karena tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan tidak dikelola dengan baik. Disebabkan oleh kurangnya pekerja pariwisata, masih ada kekurangan fasilitas yang memadai dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap objek wisata Kahui. Untuk terus memajukan dan mengembangkan objek wisata Kahui di Kecamatan Bukit Batu, usaha pemerintah dan swasta harus dilakukan dan ditingkatkan lagi. Ini akan meningkatkan pengembangan fasilitas yang ada di objek wisata.

Wisata Kahui masih memiliki banyak fasilitas yang kurang, seperti kurangnya atraksi wisata yang menarik dan unik seperti spot foto. Wisata Kahui tidak memiliki banyak penginapan dan toko makanan dan minuman serta toko

oleh-oleh dan souvenir. Selain itu, objek wisata Kahui memiliki kekurangan dalam hal transportasi bus pariwisata yang memudahkan wisatawan untuk pergi, akses jalan yang kurang memadai, dan bangunan yang ada kurang dibangun. Wisata Kahui memiliki sedikit fasilitas dan layanan untuk melayani wisatawan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Kahui adalah wisata alam yang bernuansa alam dengan tujuan untuk belajar tentang alam dan pelestarian hutan. Di kahui, pengembangan fasilitas masih sangat sedikit. Ini terbukti oleh kurangnya atraksi wisata seperti flaying fox, fasilitas seperti warung dan tempat penginapan, infrastruktur dan transportasi yang tidak memadai, serta pelayanan dan keamanan yang buruk.

### **G. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kendala Pengembangan Pariwisata**

Pariwisata adalah salah satu industri terbesar di dunia yang mendorong pertumbuhan ekonomi paling cepat. Sebagai mesin pertumbuhan, sektor ini telah terbukti kuat dan berkontribusi pada peningkatan konsumsi domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penghasilan devisa. Selain itu, pariwisata dianggap mampu menjadi sektor andalan dalam upaya meningkatkan pembandaran devisa untuk pembandaran barang dan jasa di luar negeri. Sektor pariwisata dapat memberikan beberapa manfaat, termasuk:

1. Menciptakan peluang usaha karena jumlah wisatawan yang meningkat memerlukan pelayanan yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para wisatawan.

2. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, pembukaan restoran, hotel, dan vila akan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang berpengalaman dalam industri pariwisata dalam jumlah yang cukup besar.
3. Bisa meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat sebagai hasil dari efek multiplier yang dihasilkan oleh pengeluaran wisatawan yang cukup besar.
4. Karena setiap wisatawan yang berbelanja selalu dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku, dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah.
5. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau GDB
6. Dapat mendorong investasi yang lebih besar dari bidang pariwisata dan bidang ekonomi lainnya.

Untuk mengembangkan industri pariwisata, suatu tempat harus memenuhi tiga kriteria:

1. *Something to see*: tempat tersebut harus memiliki sesuatu yang dapat dilihat atau dilihat oleh pengunjung; dengan kata lain, tempat tersebut harus memiliki daya tarik khusus yang akan menarik wisatawan untuk datang.
2. *Something to do*: Untuk membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal disana, mereka harus memiliki fasilitas rekreasi seperti tempat bermain dan makan, terutama makanan lokal.
3. *Something to buy*: adalah tempat yang dapat dibeli oleh pengunjung dan biasanya merupakan ciri khas atau simbol dari tempat tersebut, sehingga dapat dibawa sebagai oleh-oleh.

Setiap negara pasti mengalami kesulitan saat mengembangkan pariwisatanya. Indonesia, dengan beribu-ribu pulau dan berbagai adat-istiadat kebudayaan, bahasa, kondisi daerah, dan faktor lainnya, tentu menghadapi tantangan tersendiri saat membuat kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisatanya.

Beberapa komponen telah menjadi hambatan dan tantangan bagi Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan, antara lain yaitu:

1. Berita tentang kerusakan, kebakaran hutan, dan kondisi yang buruk di Indonesia cukup untuk memikat beberapa orang dan negara yang anti-Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun keamanan segera. Keamanan sangat penting bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, jika sektor pariwisata ingin berkembang dengan pesat, Pemerintah dan seluruh komponen bangsa yang ada harus bekerja sama untuk menciptakan keamanan.
2. Dalam pengelolaan pariwisata, sistem informasi yang kurang memadai juga harus diperhatikan. Sangat penting bagi sistem informasi untuk menyampaikan kondisi geografis setiap daerah di Indonesia, memberikan informasi tentang tempat wisata, memastikan kesiapan fasilitas dan prasarana di tempat wisata, dan mempromosikan keindahan Indonesia kepada negara lain.
3. Jika pariwisata ingin berkembang, sumber daya manusia (SDM) adalah masalah besar. Pariwisata sangat membutuhkan ahli dalam pengelolaan investasi, perhotelan, transportasi, komunikasi, dan informasi. Walaupun pariwisata telah membuka

banyak peluang bagi masyarakat di sekitarnya, kurangnya tenaga kerja berkualitas dapat menyebabkan sektor pariwisata tidak dikelola dengan baik.

4. Kemungkinan besar pariwisata akan dikuasai oleh negara lain dengan sumber daya manusia dan dana yang lebih besar karena kualitas sumber daya manusia yang rendah dan modal dalam negeri yang rendah untuk pengelolaan pariwisata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus bertindak dengan bijak, seperti membuat peraturan tentang investasi dan pemanfaatan tenaga kerja asing.
5. Belum mengukur jumlah wisatawan yang datang ke masing-masing Daerah Tempat Wisata (DTW). Misalnya, di DTW tertentu sangat ramai wisatawan sedangkan di DTW lain sangat sepi. Ini mungkin karena DTW tersebut kurang menarik atau kurang dipromosikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membuat DTW tersebut menarik bagi wisatawan.
6. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa pertumbuhan industri pariwisata membawa banyak orang dari negara lain dengan adat istiadat yang berbeda dari Indonesia. Ini dapat berdampak pada budaya, pergeseran nilai-nilai adat, komersialisasi, industri seks, dan lain-lain. Keutuhan dan nilai-nilai budaya harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama.

Untuk mengembangkan kawasan pariwisata, pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Memberikan banyak fasilitas yang bagus, seperti sarana umum, telekomunikasi, hotel, restoran, dan sentra pasar.
2. Infrastruktur yang baik: sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal transportasi, sumber listrik dan energi, jalan raya, keamanan, dan lain-lain.
3. Stasiun transportasi umum yang mudah diakses, murah, bersih, dan aman.
4. Keramah-tamahan masyarakat terhadap wisatawan.
5. Atraksi tempat wisata yang ditawarkan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana.

Jika pemerintah dapat mengatasi semua masalah yang ada di sektor pariwisata, bukan hal yang tidak mungkin bahwa target kunjungan wisatawan tahunan, baik lokal maupun internasional, akan tercapai. Namun, tentu saja, itu adalah tugas yang sulit karena pemerintah harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti pengusaha biro perjalanan, perhotelan, maskapai penerbangan, dan perusahaan yang terkait dengan industri tersebut. Pemerintah harus menunjukkan kepada dunia bahwa manajemen pariwisata Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain.

## SENARAI PUSTAKA

- Andari, N. (2023). *STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA, DI KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*.
- Arifudin, O. (2020). MANAJEMEN DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA CIBULUH TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Al Amar*, 1(1), 1–7. <https://www.researchgate.net/publication/343403555>
- Arman, E., & Putu Butsi Triyanti, D. (2018). EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MUSEUM LEWU HANTE DI DESA PASAR PANAS KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR. In *JAPB* (Vol. 1, Issue 1).
- Ayuwangi, G. D. (2016). *Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin Timur Dalam Upaya Menjadikan Sampit Sebagai Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021*.
- Bagaskara, P., & Hukom, A. (2023). Potensi Pengembangan Objek Parawisata Pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 267–276.
- Colina, Y. (2016). PERENCANAAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN. *REFORMASI*, 6(1), 39–51. [www.jurnal.unitri.ac.id](http://www.jurnal.unitri.ac.id)
- Djumaty, B. L., Mulatningsih, N., & Hayam Dey, N. P. (2022). Identifikasi Potensi Desa Menuju Desa Wisata

di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(3), 103–111. <https://syadani.onlinelibrary.id/>

- Febriyani, E., Yuniarti, E., & Hernovianty, F. R. (2021). TINGKAT KELAYAKAN PENGEMBANGAN POTENSI OBJEK DAYA TARIK WISATA ALAM BUKIT KEBAN DI KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU. *Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil Dan Tambang*, 8(2), 1–7.
- Haeryip Sihombing, A. P. (2010). PEMBANGUNAN KINERJA SEKTOR PUBLIK MELALUI SISTEM PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM LEAN MANAJEMEN. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3-17.
- Hartiningsih. (2019). POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA CANDI AGUNG DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA POTENTIALS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT CANDI AGUNG AS TOURISM DESTINATION AT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 231–247.
- Hidayati, S., Firmansyah, A., Al Ikklas, A., Asriani, D., Fakhriah, D., Fitriani, Safitri Hidayanti, N., Nurma, Rahman, Kartika, R., & Nursetyowati, R. (2024). Pengembangan Daya Tarik Objek Wisata Desa Lawang Kajang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 1525–1530. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2582>
- Husnatarina, F., Jasiah, Arianti, S., Minggawati, I., Nugraha, S., & Sumiatie. (2022). Desa Bukit Bamba: wisata edu dan wisata kesehatan Bukit Bamba Village: edu tourism and wellness tourism. *Masyarakat*

*Berdaya Dan Inovasi*, 3(1), 36–41.  
<https://doi.org/10.33292/mayadani.v3i1.93>

- Iban, C., & Elfrida, T. (2017). ARSITEKTUR RELIGI PESTA TIWAH DAYAK NGAJU SEBAGAI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI KALIMANTAN TENGAH. *ATRIUM*, 3(2), 101–112.
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174.  
<https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Kurniawan, T., & Suliyani. (2023). PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KAMPOENG WISATA PADA DESA SUNGAI CABANG BARAT KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16–24.
- Kusbandrijo, B., Tjahjono, E., & Ibnu Rochim, A. (2018). PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PONOROGO. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 50–61.
- M. Yusuf S. Barusman, M. I. (2016). Kepemimpinan dalam Pembangunan Sektor Publik Berbasis Pengetahuan. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5-16.
- Marantina, C., Riassy Christa, U., & Isfarudi. (2024). IMPLEMENTASI KONSEP SAPTA PESONA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA RIAM TINGGI, KECAMATAN DELANG, KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH. *Open Journal Systems*, 18(7), 1887–1892.

- Nurhajati, N. (2018). DAMPAK PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Publiciana*, 11(1), 1–13.
- Nyoman Jamin Ariana, I., & Ariana, N. (2020). IDENTIFIKASI INTEGRASI WISATA UNGGULAN ANTAR KABUPATEN DI BALI. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 20(1), 1–8.
- Nyoman Sukma Arida, I., Arida, S., & Pujani, L. K. (2017). KAJIAN PENYUSUNAN KRITERIA-KRITERIA DESA WISATA SEBAGAI INSTRUMEN DASAR PENGEMBANGAN DESAWISATA. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 1–9.
- Octora, M. (2023). Problematika Pengembangan Pariwisata Daerah di Murung Raya, Kalimantan Tengah. *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies*, 1(1), 42–52. <https://scholarhub.ui.ac.id/jitps> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jitps/vol1/iss1/15>
- Permadi, A. S., & Zannah, F. (2022). Pelatihan Tata kelola Desa Wisata Berbasis Media Branding Strategy di Desa Sungai Bakau Kabupaten Seruyan. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 841–845. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i3.5779>
- Rahmania Rifka Salsabela, R. S. (2024). Peran Aktor dalam Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo di Kota Semarang. 5-18.
- Riani, N. K. (2021). PARIWISATA ADALAH PISAU BERMATA 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469–1474.

- Rifa'i, M. N. (2019). Integrasi Pariwisata Halal di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 194–201. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9876>
- Satrio Wibowo, M., & Arviana Belia, L. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 25–32.
- Setiawati, R. (2020). IMPLEMENTASI SAPTA PESONA SEBAGAI UPAYA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA PADA WISATAWAN DI DESA WISATA PENTINGSARI. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.98>
- Shendy Yasmin Arafat, B. P. (2022). Analisis Peran Aktor dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6-23.
- Soedarso, Nurif, M., & Windiani. (2014). POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEKAYAAN ALAM DENGAN PENDEKATAN MARKETING PLACES (STUDI KASUS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 136–149.
- Suharta, R., Kusumawardani, E., & Hermawan, Y. (2021). Integrasi Program Sadar Wisata Dalam Membangun Kesadaran Literasi Di Desa Nglanggeran. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p47-63>
- Surhamzah, M. (2021, Juni). *ANALISIS AKTOR PADA PENGEMBANGAN EKOWISATA DI TAMAN WISATA ALAM MALINO*. Retrieved Juni 7, 2024

- Sutanegara Bagiana, I. G. B., & Mahendra Yasa, I. N. (2017). PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN. *E-Jurnal EP Unud*, 6(9), 1836–1867.
- Suwandi, A., Daulay, N., Hasanah Imnur, R., Zein Lubis, S. P., Nabilla Siregar, S., Pranata, S., & Wulandari, S. (2022). PERANAN DAN KENDALA PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3185–3192.
- Urmila Dewi, Ma. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN, BALI. *KAWISTARA*, 3(2), 129–139.
- Yuli Pratiwi, M. C. (2020). PERAN STRATEGIS MASYARAKAT SADAR WISATA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA (STUDI EMPIRIS: DESA UJUNG PANDARAN KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR). *Inovasi*, 17(1), 115–128.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 3(2), 2337–3520.

## PROFIL PENULIS



**Ainun Jariah, S.Sos., M.A.P.** adalah anak dari Ideham dan (*Almarhumah*) Nur Muliana, dilahirkan di Amuntai, 23 Oktober 1994. Penulis menempuh Pendidikan formal tingkat dasar pada SDN Transbangdep lulus tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Menengah ke SMP Negeri 2 Katingan Hilir dan lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah ke SMA Negeri 2 Katingan Hilir dan lulus Tahun 2013. Adapun perguruan tinggi yang ditempuh yakni pada program sarjana di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi pilihannya yaitu Program Studi Ilmu Administrasi Negara selesai pada pertengahan tahun 2017. Selanjutnya dengan beasiswa yang didapatkan maka pendidikan dilanjutkan ke jenjang Strata 2 yaitu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Program Studi Magister Administrasi Publik.

Beberp Karya Tulis /Penelitian yang telah dihasilkan bisa dilihat pada akun google scholar berikut: <https://scholar.google.com/citations?user=NrnwwmoAAA-AJ&hl=id> diantaranya 1) 2019 “Pengembangan Danau Bulat Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah”. 2) 2020, Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah”. 3) 2021, “Implementasi literasi digital dalam peningkatan daya tarik

wisata di era new normal Kota Palangka Raya”. 4) 2022, “Pengelolaan Dukuh Betung Sebagai Wisata Local Culture Masyarakat Dayak Kabupaten Katingan”. 5) 2023, “Empowering Leadership Women Dalam Meningkatkan Ekonomi Menurut Perspektif Muhammadiyah Pada Era New Normal Di Kota Palangka Raya”. 6) 2023, “Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan”. 2023, “Actor Relationship Model in the Development of New Housing Facilities in Palangka Raya City: Problems and Urgency of Providing Public and Social Facilities. 2024, “The Urgency of Implementing Collaborative Governance in New Housing in Palangkaraya City”. 2024, “Performance Evaluation of Community Welfare Programs: A Public Policy Analysis Approach”.

Sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019 sudah berkecimpung pada dunia perpolitikan dengan menjadi bagian dari pesta Demokrasi Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Katingan sebagai PPK Kecamatan Katingan Hilir dan Panwaslu Kecamatan Katingan Hilir.

Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi ilmu Administrasi Negara.



**Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H.** adalah anak dari (*allahu yarham*) Akhmad dan (*allahu yarham*) Wahidah, dilahirkan di Masupa Ria, 20 Maret 1990. Penulis menumpuh pendidikan formal tingkat dasar pada SDN Batik, lulus tahun 2004, selanjutnya penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Mujahidan Marabahan selama 6 tahun (setara

MTsN dan MA) lulus pada tahun 2010. Adapun perguruan tinggi yang ditempuh oleh suami dari Mariya Ulfah, S.EI. M.E, yakni di IAIN Antasari Banjarmasin (sekarang UIN Antasari) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang menjadi pilihannya yaitu Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum selesai pada awal tahun 2014. Di tahun yang sama tepatnya di akhir tahun 2014 ayah dari Syauqia Hanifah dan Muhammad Fatih Zidan, melanjutkan Program Magesternya di Pascasarjana UIN antasari Banjarmasin mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan telah menyelesaikan Program Magisternya pada tahun 2016. Pada saat ini ayah dua anak itu juga tercatat sebagai lulusan dari Pascasarjana Program Doktor pada Prodi Ilmu Syariah di UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 yang lalu.

Beberapa Karya Tulis/Penelitian yang telah di hasilkan bisa dilihat pada akun google scholar berikut <https://scholar.google.com/citations?user=00nF9QcAAAA&hl=id> diantaranya: 1) 2014, Skripsi, “Studi Komperatif antara Qaul Qodim dan Qaul Jadid Imam Syafi’I tentang talak suami dalam keadaan mabuk”. 2) 2016, Tesis, Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Akad Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Kontemporer. 3) 2017,

Pemakalah Seminar Nasional, Integrasi Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi dalam Praktik Jual Beli di Pasar Terapung di Kalimantan Selatan. 4) 2017, Pemakalah Seminar Internasional, Nilai-nilai Qur'ani dan Sunnah Nabi pada Praktik Jual Beli di Pasar Terapung Kalimantan Selatan. Bisnis Dalam Islam: Business in Islam 2018, Pembelajaran Ekonomi dalam Islam pada Materi Mudharabah di Pondok Pesantren: *Economic Learning in Islam on Mudharabah Material in Islamic Boarding Schools* 2019, Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer 2020, Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam 2021, Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: *Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan* 2022, serta mendapatkan beberapa hibah penelitian dan pengabdian dari pemerintah indonesia dengan beberapa judul: Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan 2023, *Actor Relationship Model in the Development of New Housing Facilities in Palangka Raya City: Problems and Urgency of Providing Public and Social Facilities* 2023 serta masih adalagi bebrapa penelitian dan pengabdian. Pemikiran hukum ekonomi syariah dalam pengembangan dan implementasi 2024.

Saat ini penulis menjabat Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (2017 sampai dengan sekarang). Disela kesibukan penulis juga menjadi Dosen di beberapa Universitas Islam Negeri maupun swasta dan Sekolah Tinggi Agama Islam yang berada di Kalimantan Selatan (Dosen Tidak Tetap pada UIN Antasari di Banjarmasin: 2016-2017, Dosen Tidak Tetap pada UNISKA

Al-Banjari di Banjarmasin: 2016-2017) dan Kalimantan Tengah Dosen Tidak Tetap pada STAI Siti Khadijah Muara Teweh: 2016) dan melabuhkan Dosen Tetapnya pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sampai sekarang.



**Nurbaiti Dailayanti** adalah penulis kelahiran 10 Agustus 2002 di Palangka Raya dan juga Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Setelah lulus dari SMA Darul Hijrah Puteri yang berada di Kalimantan Selatan, ia memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya dan melanjutkan studi di sana.

Selama berkuliah, ia cukup aktif dalam mengikuti program di kampus, seperti ikut serta dalam kegiatan PKM-GT tingkat Universitas, mengikuti organisasi BEM FISIP, dan mengikuti kegiatan PMM angkatan tiga ke Universitas Muhammadiyah Malang selama satu semester yang diadakan oleh kemendikbudristek.

Penulis sangat suka mencoba hal baru yang menambah ilmu serta pengalamannya. Semenjak SD penulis sudah sering menulis cerita fiksi yang terus dikembangkan sampai sekarang. Saat SMA, penulis sempat mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik dan terpilih menjadi anggota OSIS bagian jurnalistik. Buku ini adalah karya pertama penulis dan menjadi karya pertama non-fiksi yang ia kerjakan sehingga menjadi pelajaran menarik lagi untuk dirinya.



**Imanda Salsabila** adalah anak dari pasangan Tukiman dan Sri Emilawati, dilahirkan di Palangka Raya, 10 Juni 2003. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat dasar pada MI Negeri 3 Kereng Bangkirai lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan

Pendidikan Menengah ke SMP Muhammadiyah Palangka Raya dan lulus tahun 2018, kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah ke SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya dan lulus tahun 2021. Adapun perguruan tinggi yang sedang ditempuh yakni pada program Sarjana di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pada tahun 2024 mulai memiliki ketertarikan pada dunia perpolitikan dengan menjadi bagian dari pesta Demokrasi Pemilu di Kota Palangka Raya sebagai KPPS Kelurahan Kereng Bangkirai.

Buku ini mengkaji dinamika pembangunan daerah di Kalimantan Tengah dengan fokus utama pada pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Melalui pendekatan multidisiplin, penulis mengeksplorasi bagaimana potensi budaya dan tradisi lokal dapat diintegrasikan dalam strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian pertama buku ini memperkenalkan pembaca pada latar belakang dan potensi pariwisata di Kalimantan Tengah, termasuk keanekaragaman alam dan budaya yang dimiliki daerah ini. Penulis menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pariwisata, seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya promosi, dan isu-isu lingkungan.

Bagian kedua menggali konsep local wisdom atau kearifan lokal sebagai basis pengembangan pariwisata. Penulis menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Dayak, yang merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah, dapat menjadi aset berharga dalam membentuk identitas pariwisata daerah. Contoh-contoh konkret seperti ritual adat, seni tari, dan kerajinan tangan dibahas secara mendalam.

Bagian ketiga menyajikan strategi dan langkah-langkah praktis untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Penulis menawarkan model-model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata. Studi kasus dari beberapa destinasi wisata di Kalimantan Tengah yang telah berhasil menerapkan konsep ini juga disertakan untuk memberikan gambaran nyata kepada pembaca.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah yang tidak hanya meningkatkan perekonomian daerah tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan lokal. Buku ini ditujukan bagi para akademisi, praktisi pariwisata, pembuat kebijakan, serta siapa saja yang tertarik dengan isu-isu pembangunan daerah dan pariwisata berkelanjutan.

Penerbit K-Media  
Bantul, Yogyakarta  
📧 kmediacorp  
✉ kmedia.cv@gmail.com  
🌐 www.kmedia.co.id

